



**LAKIP**



**BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan adanya LAKIP dapat mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja di lingkunga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kami serta informasi yang disajikan, Olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).



Kepala Badan kesbangpol

Hj. Asliah Rahim, S.Sos.,M.Si

**Daftar Isi**

|   |           |
|---|-----------|
| Kata Pengantar.....                                     | i         |
| Daftar Isi.....   | ii        |
| Daftar Tabel, Bagan, Chart dan Gambar.....              | iii       |
| <b>BABI. I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>  |
| A. Umum.....  | 1         |
| 1. Latar Belakang.....                                  | 1         |
| 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan.....            | 2         |
| 3. Dasar Hukum.....                                     | 3         |
| B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .....               | 4         |
| 1. Kedudukan OPD.....                                   | 4         |
| C. Isu Strategis Organisasi .....                       | 7         |
| <b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>                 | <b>11</b> |
| A. Rencana Strategis.....                               | 11        |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....                   | 16        |
| <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....</b> | <b>19</b> |
| A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.....                | 19        |
| B. Akuntabilitas Keuangan .....                         | 65        |
| <b>BAB IV. PENUTUP.....</b>                             | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>                              |           |
| 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024                        |           |
| 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024                        |           |

**DAFTAR BAGAN, TABEL, CHART DAN GAMBAR**

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Bagan     | Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.  | 6  |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024  | 14 |
| Tabel 2.2 | Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2024   | 18 |
| Tabel 3.1 | Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  | 20 |
| Tabel 3.2 | Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024   | 21 |
| Tabel 3.3 | Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024  | 29 |
| Tabel 3.4 | Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024   | 24 |
| Tabel 3.5 | Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024  | 45 |
| Tabel 3.6 | Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024   | 52 |
| Tabel 3.7 | Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2024  | 59 |
| Tabel 3.8 | Jenis Pelayanan Publik dan Non Pelayanan Langsung   | 64 |
| Chart 3.1 | Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir). | 24 |
| Chart 3.2 | Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir). | 32 |
| Chart 3.3 | Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir). | 40 |
| Chart 3.4 | Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir). | 48 |
| Chart 3.5 | Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2032 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir). | 55 |
| Chart 3.6 | Perkembangan Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2023   | 60 |
| Chart 3.7 | Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024  | 66 |
| Gbr 3.1   | Kegiatan Paskibraka 2024  | 28 |
| Gbr 3.2   | Kegiatan Netralitas ASN   | 35 |

|     |     |   |    |
|-----|-----|---|----|
| Gbr | 3.3 | Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah  | 43 |
| Gbr | 3.4 | Kegiatan Monev ormas  | 51 |
| Gbr | 3.5 | Kegiatan Diseminasi Moderasi Beragama dan Monev ketahanan keluarga Anti Narkoba | 58 |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Umum

#### 1. Latar Belakang

Salah satu tuntuan publik pada saat ini adalah terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengacu pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Melalui SAKIP ini, disusun perencanaan kinerja yang focus pada permasalahan utama pemerintahan atau organisasi serta berorientasi pada perbaikan pencapaian sasaran kinerja yang terukur. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya diukur pencapaiannya secara berkala serta

mengidentifikasi permasalahan dan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diupayakan untuk memastikan tercapainya sasaran. Pada setiap tahun kinerja berakhir, maka entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan diikuti dengan review dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP pada tahun-tahun selanjutnya.

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2024 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

## **2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan**

Penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

### **3. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini, sebagai berikut :

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini, sebagai berikut :

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

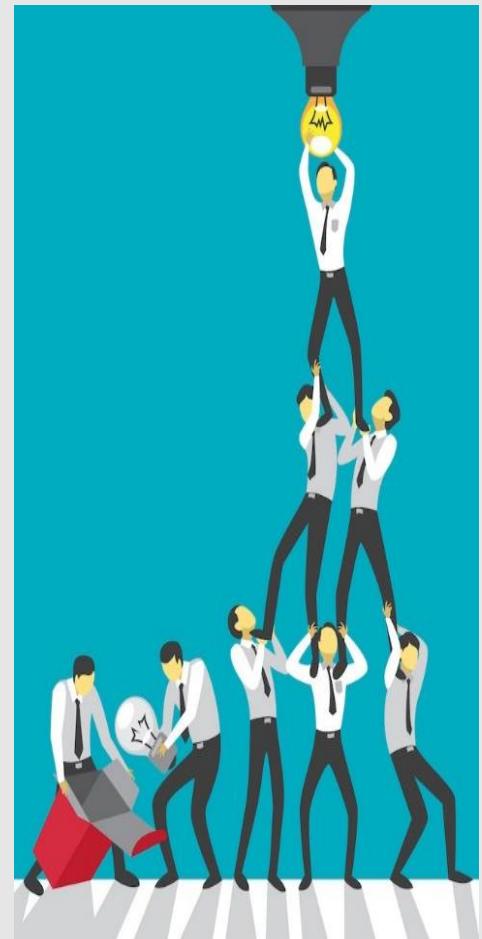
 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### Kedudukan OPD

Berdasarkan struktur Kepegawaian OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu Unsur Penujang Pemerintahan memiliki susunan organisasi yang terjabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Pasal 9 Ayat (3) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Pada Bab XXIX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Paragraf 1 kedudukan dan Paragraf 2 Tugas dan Fungsi, dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut :

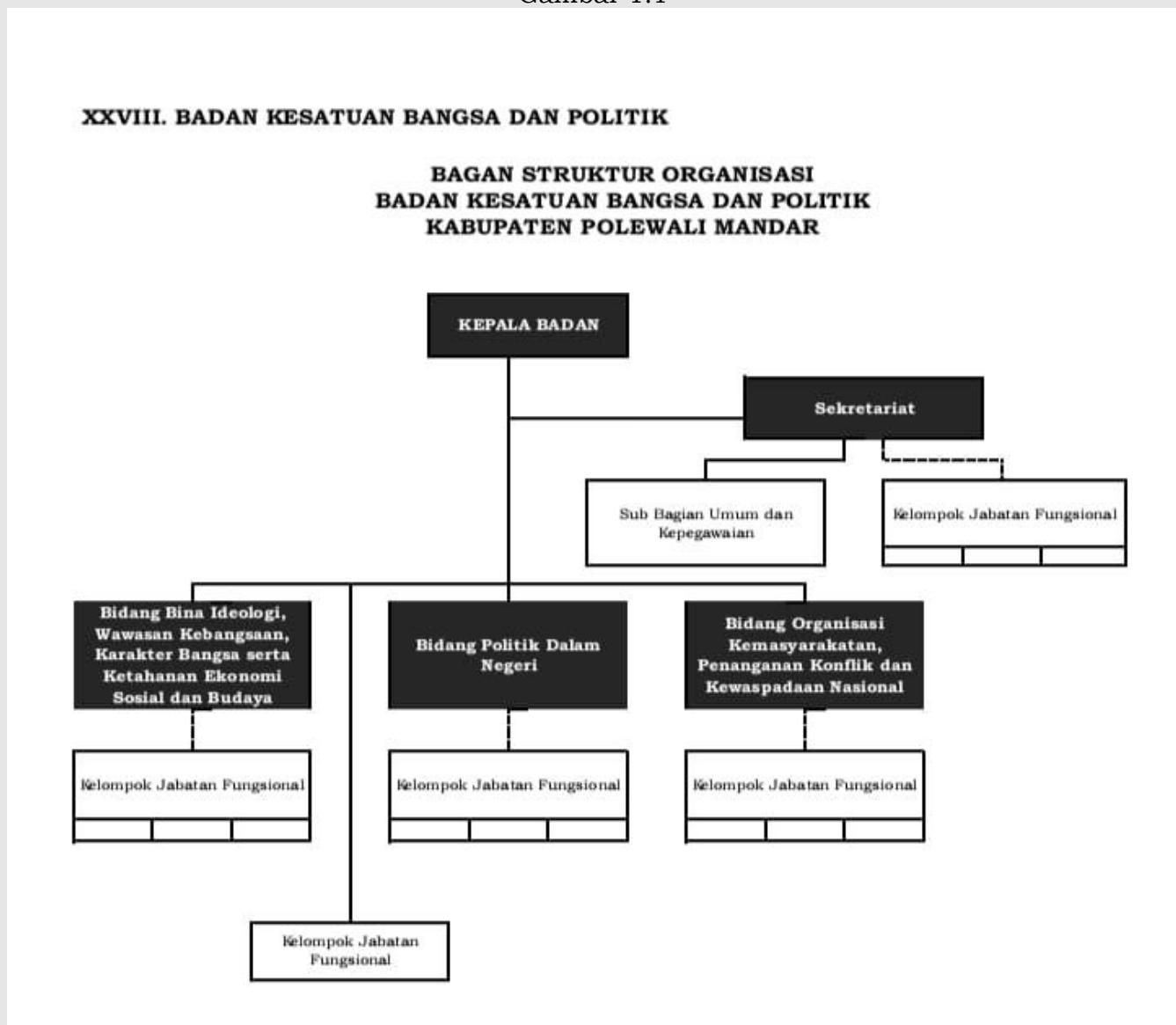
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di Bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait. Susunan Organisasi Sekretariat Sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 426, terdiri atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas Sub Bagian, sebagai berikut :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam 425 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, Karakter bangsa serta Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Susunan Organisasi Bidang Ideologi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam 425 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pembinaaan dan fasilitasi politik dalam negeri. Susunan Organisasi Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam 425 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pembinaaan Organisasi Kemasyarakatan , Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. Susunan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Terkait dengan Tugas dan Fungsinya

## C. Isu Strategis Organisasi

Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah memiliki fungsi antara lain Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan pembinaan kesatuan bangsa serta Peningkatan stabilitas keamanan dan Perkembangan Politik dalam negeri. Sesuai dengan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan upaya melalui penetapan program kerja berupa Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. pengembangan wawasan kebangsaan dilakukan uapaya antara lain memberikan pemahaman wawasan kebangsaan berupa penguatan empat pilar kebangsaan kepada generasi muda dan masyarakat, Dalam bidang pendidikan politik dilakukan upaya antara lain Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik Di daerah, serta Kegiatan fasilitasi verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Sosialisasi pendidikan politik di sekolah yang ada di kabupaten polewali mandar.

Untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

maka dilakukan upaya antara lain penyelenggaraan Kewaspadaan Dini melalui Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda ), dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberadaan ormas dan melakukan tertib administrasi ormas dan adanya ormas yang mendapatkan bantuan hibah ormas dalam rangka mendukung kinerja ormas Untuk pengembangan Ketahanan ekonomi sosial dan budaya dilakukan upaya antara lain kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, kegiatan penyelenggaraan rakor pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan, dan peredaran gelap Narkoba ( P4GN ) untuk menyelaraskan pemahaman mengenai obat-obatan terlarang dan cara mencegahnya

Upaya-upaya sebagaimana di atas telah membantu menciptakan situasi kondusif dalam kehidupan masyarakat Kab.Polewali Mandar.

### **Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi**

Sejalan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang maka berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya serta keamanan senantiasa dapat terjadi. Oleh karena itu faktor-faktor berupa infrastruktur jalan yang kurang baik terutama di daerah pelosok, sarana mobilitas Badan yang belum memadai hingga kualitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih kurang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor.

Faktor-faktor sebagaimana di atas berpengaruh besar terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar yang harus bekerja secara offensive bukan lagi deffensive dalam menyikapi dinamika sosial dan politik yang terus menerus harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan di masyarakat

- **Tantangan dan Peluang**

Stabilitas keamanan, ekonomi sosial dan budaya serta politik yang tetap terjaga merupakan prasyarat untuk dapat dilaksanakannya pembangunan. Hal ini merupakan tantangan yang perlu diupayakan terus menerus tercipta di tengah masyarakat. dengan demikian hal-hal seperti aturan-nilai-nilai budaya yang hidup/mengikat masyarakat, kemajuan teknologi informasi, pengaruh tokoh masyarakat dan tokoh agama, berkembangnya perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan dan sebagainya merupakan entitas yang perlu dikelola sebagai peluang dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Identifikasi permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Kondusivitas Wilayah :

- a. Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;

2. Toleransi :

- a. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat terutama akibat penurunan tingkat ekonomi disebabakan adanya kenaikan inflasi;
- b. Masih tingginya penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu;
- c. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budi luhur, budi pekerti dan etika budaya bangsa yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi,

penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.

3. Demokrasi :

- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
- b. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pilkada dan pilkades.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

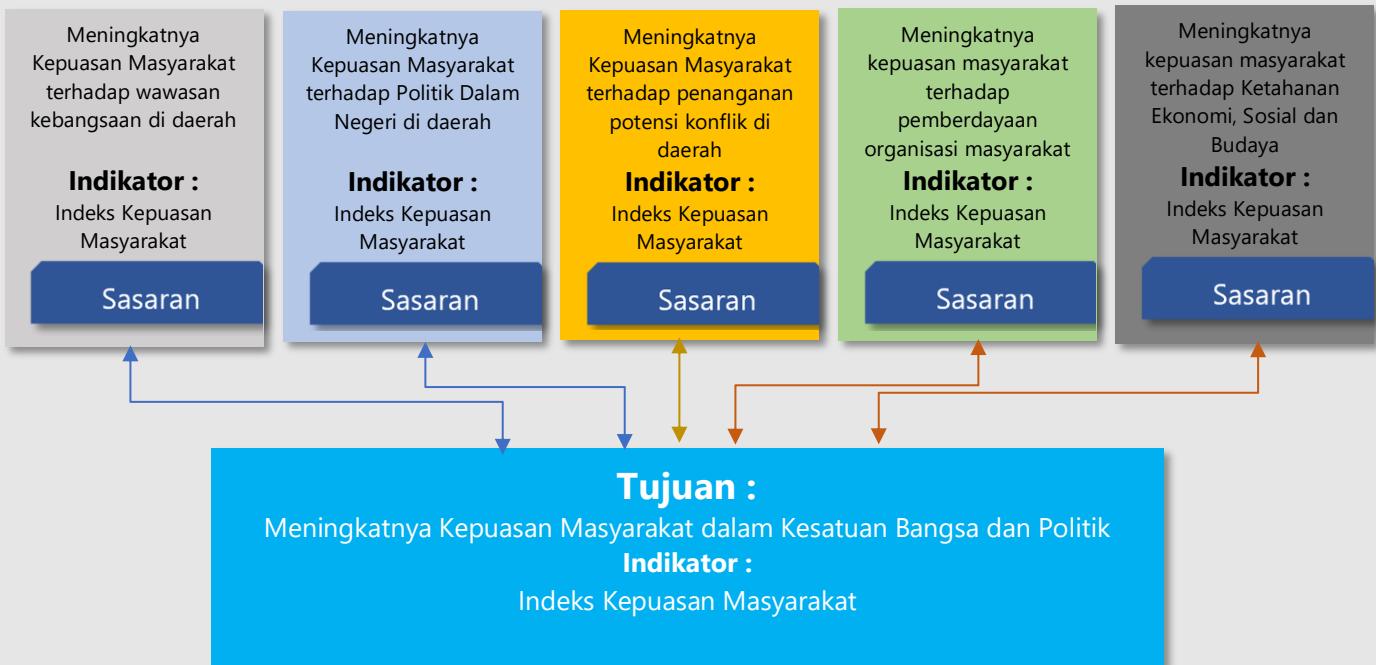
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arah kebijakan strategis pembangunan 2019-2024, sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Berdasarkan hasil pelaksanaan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024.

Selain itu, pada tahun 2016 terdapat perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di daerah, sehingga dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut melalui perubahan struktur kelembagaan di Kabupaten Polewali.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019- 2024, dirumuskan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , Tahun 2019-2024**



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continuously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Dengan mengamati kondisi saat ini dan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang ada, maka ditetapkan pencapaian target pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi melalui Forum Rapat Bersama, dengan penentuan target sebagai berikut :

**Tabel. 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024**

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Tujuan/<br>Sasaran            | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke- |             |                    |                    |                    |                    |
|----|---|--|---|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |   |  |   | 2019  | 2020        | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
| 1  | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Kesatuan Bangsa dan Politik</b> |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>       | <b>Baik</b>                                   | <b>Baik</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>Sangat Baik</b> |
|    |   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah         | Indeks Kepuasan Masyarakat              | Baik  | Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        |
|    |   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah       | Indeks Kepuasan Masyarakat              | Baik  | Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        |
|    |   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat              | Baik  | Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        |
|    |   | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat   | Indeks Kepuasan Masyarakat              | Baik  | Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        |
|    |   | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Indeks Kepuasan Masyarakat              | Baik  | Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        | Sangat Baik        |
| 2  | <b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat</b>                                   |  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b> | <b>Baik</b>                                   | <b>Baik</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>Sangat Baik</b> | <b>Sangat Baik</b> |

|  |                                  |  |                                 |        |             |             |             |             |   |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|  | <b>Terhadap Pelayanan Publik</b> | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah  | Predikat SAKIP perangkat daerah | BB     | BB          | BB          | BB          | A           | A |
|  |                                  | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 93.33%                          | 95.56% | 93.33%      | 95.56%      | 97.78%      | 100%        |   |
|  |                                  | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah       | Baik                            | Baik   | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |   |

## B.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, sebagai berikut :



**Sasaran Strategis 1 :**  
**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Wawasan kebangsaan di daerah**

Indikator :  
 Indeks Kepuasan Masyarakat

**Target :**  
**Sangat Baik**



**Sasaran Strategis 2 :**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah**

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

**Target :**

**Sangat Baik**



**Sasaran Strategis 3 :**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah**

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

**Target :**

**Sangat Baik**



**Sasaran Strategis 4 :**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Organisasi Masyarakat**

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

**Target :**

**Sangat Baik**



**Sasaran Strategis 5 :**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

**Target :**

**Sangat Baik**



**Sasaran Strategis 6 :**  
**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Memerintahan Perangkat Daerah**

Indikator :

Predikat SAKIP perangkat daerah

**Target : A**

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

**Target : 100%**

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

**Target : Sangat Baik**

Untuk mencapai sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2024**

| <b>Sasaran Strategis</b>   | <b>Program</b>   | <b>Anggaran</b>            |
|--|--|----------------------------|
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah         | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Rp. 814.304.870,-          |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah       | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Rp. 54.468.074.754,-       |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                          | Rp. 65.633.943,-           |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat   | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Rp. 21.582.153,-           |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan ekonomi sosial dan budaya  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya   | Rp. 23.682.157,-           |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  | Rp. 2.065.669.966,-        |
| <b>J u m l a h</b>   |  | <b>Rp.57.458.947.843,-</b> |



## C. INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2024

Penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas menjadi suatu tuntutan utama. Dalam Upaya meningkatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengaplikasikan instrument layanan berbasis elektronik, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas keterbukaan informasi public, mengaplikasikan PPID, Website terintegrasi dan aplikasi Lapor dan Media social.
2. Peningkatan kualitas data sektoral didukung layanan data setoral, data makro melalui aplikasi Polman Satu Data terkait data Ormas, Partai Politik, penanganan konflik, rekomendasi penelitian dan lainnya
3. Predikat SAKIP Perangkat Daerah didukung melalui layanan e-SAKIP terintegrasi, peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan dan asset didukung ketersediaan aplikasi Simda BMD, SIPD Perencanaan dan Penganggaran, serta Peningkatan indeks kepuasan Masyarakat/stakeholder didukung melalui ketersediaan aplikasi e-Survey layanan,
4. Aplikasi SIORMAS Kemendagri dalam hal mendukung pelayanan pembuatan SKT ormas



## **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA** **DAN KEUANGAN**

### **A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2019-2024. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

| No. | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI      |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1   | >85 – 100%            | Sangat Baik   |
| 2   | >70 – 85 %            | Baik          |
| 3   | >60 – 70 %            | Cukup         |
| 4   | >50 – 60%             | Kurang        |
| 5   | 50 %                  | Sangat Kurang |

Dalam mengukur tingkat persentase Capaian Kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu sebagai berikut :

➤ Semakin tinggi realisasi maka pencapaian kinerja semakin baik :

$$\text{Persentase pencapaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

➤ Semakin tinggi realisasi semakin rendah pencapaian kinerja :

$$\text{Persentase pencapaian : } \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



**Sasaran Strategis 1 :**  
**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan di Daerah**

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

Target :

**Sangat Baik ( >85 – 100%)**

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran strategis I digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2024

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja          | Target              | Realisasi         | Capaian |
|----|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| 1. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan di Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sangat Baik ( 100 ) | Sangat Baik (100) | 100 %   |

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis I, predikat indeks kepuasan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2024, yaitu dari target sangat baik (85-100%) terealisasi sangat baik (100,00%).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, mengisyaratkan pentingnya mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada :

- a. Organisasi politik
- b. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga nirlaba lainnya
- c. Pegawai negeri sipil
- d. Guru / penyidik; dan
- e. Tokoh agama/masyarakat/adat
- f. Pemuda dan Pelajar

Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan :

- a. Pembangunan karakter bangsa
- b. Pelibatan Kerjasama multipihak
- c. Keterbukaan
- d. Kreatifitas
- e. Integritas antara ucapan, pikiran dan Tindakan; dan
- f. Penggalian dan penggunaan muatan local

Dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang pedoman Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tujuan Penyelenggaraan dan pembinaan Kepada Generasi Muda Tentang Pemahaman Nilai-nilai Luhur Pancasila dan Ideologi Negara serta Wawasan Kebangsaan yang berkelanjutan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila yang dilambangkan dalam kendit bertuliskan Pandu Ibu Indonesia BerpancaSilla

Maka predikat indeks kepuasan Masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- nilai 85-100 : sangat baik
- nilai lebih dari 70-84 : baik
- nilai 60-70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan sebagai berikut :

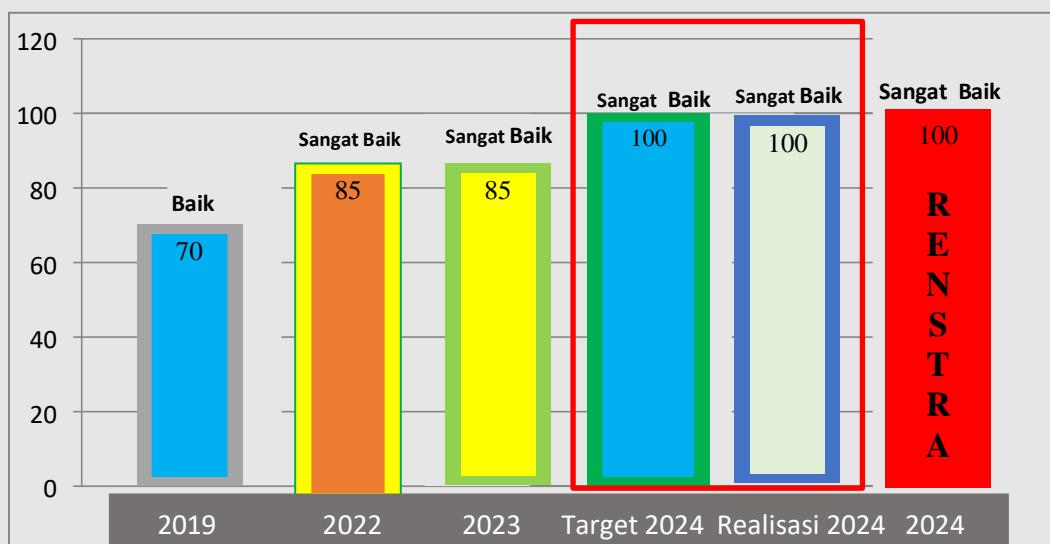
Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran I untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemahaman wawasan kebangsaan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan adalah target sasaran sesuai pedoman penyelenggaraan wawasan kebangsaan dengan melibatkan unsur Pelajar di Kabupaten Polewali Mandar dalam kegiatan yang telah dilakukan Jumlah Peserta 75 orang Untuk Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka ) dan masuk kategori baik (85-100) dari target 75 orang terealisasi 100 %. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah Institusi/sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan berupa pembentukan kader paskibraka sebagai calon-calon duta, adapun peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Polewali Mandar dalam mendukung penyelenggaraan wawasan kebangsaan sebagai berikut :

| No. | Nama Institusi/Sekolah | Jumlah |
|-----|------------------------|--------|
| 1   | SMAN 1 Polewali        | 23     |
| 2   | SMAN 2 Polewali        | 5      |
| 3   | SMAN 3 Polewali        | 14     |
| 4   | SMKN 1 Polewali        | 5      |
| 5   | SMAN Matakali          | 1      |
| 6   | SMAN 1 Wonomulyo       | 5      |
| 7   | SMAS YPPP Wonomulyo    | 1      |
| 8   | SMKS YPPP Wonomulyo    | 1      |
| 9   | MAN 1 Polman           | 8      |
| 10  | SMKN Luyo              | 1      |

|    |                    |          |
|----|--------------------|----------|
| 11 | SMAN 1 Campalagian | 3        |
| 12 | SMKN Campalagian   | 1        |
| 13 | SMKN Labuang       | 1        |
| 14 | SMAN 1 Tinambung   | 4        |
| 15 | SMK Limboro        | 1        |
| 16 | SMAN 1 Alu         | 1        |
|    | JUMLAH             | 75 orang |

#### PREDIKAT : SANGAT BAIK

Chart 3.1  
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat  
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024  
 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Bidang Bina Ideologi Wasbang, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekosbud , Januari 2024

**Capaian Kinerja dasar target 2024**  

$$= \frac{100,00}{100,00} 100 \%$$

**Capaian Kinerja dasar 2019-2024, Meningkat :**  

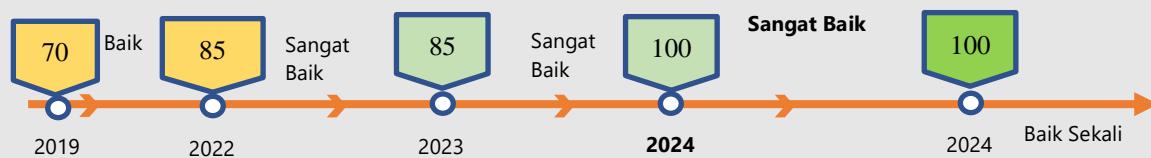
$$30,00\%$$

**Capaian Kinerja target Akhir Renstra**  

$$= \frac{100,00}{100,00} 100 \%$$

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemahaman Wawasan kebangsaan Masyarakat (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemahaman Wawasan kebangsaan Masyarakat tahun 2022 dan 2023 Sudah Meningkat level Sangat baik (85%). Capaian ini dipengaruhi peningkatan pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan dengan adanya sosialisasi kepada target 2023 yaitu kelompok Lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa dan Jurnalis. sehingga target dan realisasi untuk tahun 2024 sudah di perluas dari indikator penyelenggaraan wawasan kebangsaan ke kelompok Pelajar dalam Bentuk pembinaan Nilai-nilai Pancasila Kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka )

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%. Capaian ini, dapat digambarkan dengan milestone sebagai berikut :



## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

### **Faktor Penunjang :**

- Adanya regulasi terkait Penyelenggaraan Pemahaman wawasan kebangsaan dan Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah
- Adanya Regulasi Terkait Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang lebih menekankan pembinaan ideologi pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan

### **Faktor Penghambat :**

- Belum terbentuknya Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebagaimana amanat permendagri 71 tahun 2012 di Polewali Mandar
- Kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat dalam hal pemahaman wawasan kebangsaan yang mencakup empat pilar kebangsaan disebabkan setiap tahun terbatas jumlah peserta yang disasar dan bahkan tahun 2024 tidak dilaksanakan akibat refocusing anggaran
- Kegiatan Tahun ini sebatas pembentukan paskibraka, seharusnya dalam mendukung Pemahaman wawasan kebangsaan perlu juga dilakukan dialog empat pilar kebangsaan kepada kelompok masyarakat

### **Alternatif Solusi yang telah diupayakan :**

- Intens berkomunikasi dengan anggota MPR RI Dapil Sulbar terkait tugasnya dalam mensosialisakan empat pilar kebangsaan di daerah untuk senantiasa Bersama dengan jajaran kesbangpol
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan
- Bekerjasama dengan dinas kominfo SP kabupaten polewali mandar dalam menyebarluaskan informasi terkait empat pilar kebangsaan
- Segera membentuk Pokja PPWK melalui Keputusan Bupati untuk melakukan upaya percepatan penyebarluasan Pendidikan wawasan kebangsaan.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah sebagai berikut :

| Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Alokasi Anggaran Perubahan | Realisasi                | %        |
|--|----------------------------|--------------------------|----------|
| <b>Program</b> Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan<br><b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | <b>Rp. 818.000.555,-</b>   | <b>Rp. 818.000.555,-</b> | <b>0</b> |
| <b>Sub Kegiatan</b><br>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ikat dan Sejarah Kebangsaan                   | Rp. 0,-                    | Rp. 0,-                  | 0        |
| <b>Sub Kegiatan</b><br>Pembentukan Paskibraka  | Rp. 818.000.555,-          | Rp. 818.000.555,-        | 100      |
|  |                            |                          |          |

**Gambar 3.1. Kegiatan Paskibraka 2024**



**75 Calon Paskibraka Ikuti Upacara Pembukaan Diklat Calon Paskibraka Polman 2024**

- Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Upacara Pembukaan Diklat Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, di Pendopo Rujab Bupati, pada Hari Senin 29 Juli 2024



**75 Calon Paskibraka Ikuti Upacara Pembukaan Diklat Calon Paskibraka Polman 2024**

- Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Upacara Pembukaan Diklat Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, di Pendopo Rujab Bupati, pada Hari Senin 29 Juli 2024



Foto bersama Forkopimda  
Usai Pelaksanaan  
Upacara Pengibaran  
Bendera HUT RI Ke 79



Foto bersama Forkopimda  
Usai Pelaksanaan  
Upacara Pengibaran  
Bendera HUT RI Ke 79

**Sasaran Strategis 2 :**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

**Target : Sangat Baik ( 85-100 % )**

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran strategis II digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2024

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja          | Target                 | Realisasi  | Capaian |
|----|--|----------------------------|------------------------|------------|---------|
| 1. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Politik dalam negeri di daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sangat Baik ( 85-100 ) | Baik (100) | 100 %   |

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis II, predikat indeks kepuasan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2024, yaitu dari target sangat baik (85-100%) terealisasi sangat baik (100,00%).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan politik , mengisyaratkan pentingnya mengoptimalkan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik dan memberikan kemudahan bagi partai politik, organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan Lembaga atau instansi vertical di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan Pendidikan politik di daerah

Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan antara lain :

- a. Seminar dan lokakarya

- b. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan
- c. Asistensi , pelatihan dan bimbingan teknis
- d. Pagelaran seni dan budaya
- e. Jambore, perkemahan dan napak tilas dan;
- f. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya ilmiah, film documenter, dan cipta lagu.

Kelompok sasaran terkait fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik meliputi :

- a. Partai politik
- b. Organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
- c. Lembaga nirlaba lainnya
- d. Lembaga atau instansi vertikal di daerah

Materi atau muatan dalam fasilitasi Pendidikan politik baik wajib dan pilihan sebagai berikut :

- a. Pancasila
- b. UUD 1945
- c. Demokrasi
- d. Hak asasi manusia
- e. System pemerintahan
- f. Budaya dan etika politik
- g. Pendidikan kewarganegaraan
- h. Dll.

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran II untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah yang meliputi :

1. kegiatan sosialisasi Netralitas ASN Menjelang Pemilu 2024 adalah target sasaran sesuai pedoman fasilitasi Pendidikan politik dengan melibatkan unsur Pendidik Di Tingkat sekolah Dasar di Kecamatan Polewali Jumlah Peserta 100 orang untuk Pendidikan politik dan masuk kategori baik sekali (85-100) dari target 35 orang terealisasi 100 %. Capaian ini diproleh dengan membandingkan Jumlah Institusi yang berpartisipasi dalam kegiatan Pendidikan politik dengan jumlah institusi yang ditargetkan dalam mendukung pemahaman politik di masyarakat,
2. Sosialisasi Netralitas ASN menjelang Pilkada 2024 dilaksanakan di 5 (lima) Zona yang sasarannya adalah Aparat Kecamatan, Desa Kelurahan serta Puskesmas dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Adapun pembagian Zona Sosialisasi Netralitas ASN sebagai Berikut :

| <b>No.</b> | <b>Zona</b> | <b>Kecamatan</b>   | <b>Tempat Pelaksanaan</b> |
|------------|-------------|--|---------------------------|
| 1.         | I           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polewali</li> <li>• Binuang</li> <li>• Anreapi</li> <li>• Matakali</li> </ul>     | Ruang Pola Kantor Bupati  |
| 2.         | II          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wonomulyo</li> <li>• Tapango</li> <li>• Mapilli</li> <li>• Campalagian</li> </ul> | Aula Akper YPPP Wonomulyo |
| 3.         | III         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinambung</li> <li>• Balanipa</li> </ul>  | Taman Budaya Buttu Ciping |

|    |    |   |                      |
|----|----|---|----------------------|
|    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limboro</li> <li>• Alu</li> <li>• Campalagian</li> </ul> | Tinambung            |
| 4. | IV | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luyo</li> <li>• Tutar</li> </ul>                         | Kantor Camat<br>Luyo |
| 5. | V  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulo</li> <li>• Matangnga</li> </ul>                     | Kantor Camat<br>Bulo |

### PREDIKAT : SANGAT BAIK

Chart 3.2  
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat  
 Terhadap Politik Dalam Negeri di Daerah  
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024  
 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Bidang Politik Dalam Negeri , Januari 2024

**Capaian Kinerja dasar target 2024**  

$$= \frac{100,00}{100,00} \quad 100 \%$$

**Capaian Kinerja dasar 2019-2024, Meningkat :**  

$$30,00\%$$

**Capaian Kinerja target Akhir Renstra**  

$$= \frac{100,00}{100,00} \quad 100 \%$$

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap politik dalam negeri (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah tahun 2022 dan 2023 Sudah berada (100%). Hal ini semakin aktif dan massif dilakukan sosialisasi menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Politik dalam negeri berupa Pendidikan politik mengalami peningkatan pada tahun 2024 (100,00 %). Capaian ini dipengaruhi peningkatan pemahaman masyarakat akan Pendidikan politik berupa Sosialisasi Netralitas ASN dengan adanya sosialisasi kepada target Sudah Maksimal dengan Menyasar Kelompok Tenaga Pendidik, Aparat Desa dan kelurahan Serta Tenaga Kesehatan .

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

#### Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Pedoman Pendidikan Politik
- Telah melibatkan Unsur Partai Politik serta Tenaga Pendidik, Lurah dan Kepala Desa Serta tenaga Kesehatan dalam Proses Pendidikan Politik.

#### Faktor Penghambat :

- Belum Optimalnya Sosialisasi Disebabkan Tingkat Partisipasi Pemilih Pada pemilu 2024 dan Pilkada Mengalami Penurunan
- Masih Minimnya Anggaran Pendidikan Politik Pada badan kesbangpol sehingga belum maksimal dilaksanakan

### Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Mengupayakan lebih intens berkomunikasi dengan partai politik supaya senantiasa dilibatkan dalam proses Pendidikan politik yang dulakukan oleh partai politik sehingga informasi dari pemerintah lebih terarah dalam pemahaman politik dimasyarakat
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah dalam mensosialisasikan Pendidikan politik
- Bekerjasama dengan dinas kominfo SP kabupaten polewali mandar dalam menyebarluaskan informasi terkait Pendidikan politik kepada masyarakat

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap politik dalam negeri daerah sebagai berikut :

| Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Alokasi Anggaran            | Realisasi                   | %            |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Program</b> Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik<br><b>Kegiatan</b> Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik | <b>Rp. 59.013.769.390,-</b> | <b>Rp. 58.508.920.471,-</b> | <b>99.14</b> |
| <b>Sub Kegiatan</b><br>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di  | Rp. 974.647.775,-           | Rp. 470.100.677,-           | 48.23        |

|  |                      |                      |       |
|--|----------------------|----------------------|-------|
| Daerah   |                      |                      |       |
| <b>Sub Kegiatan</b><br>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik                          | RP. 58.020.924.949,- | RP. 58.020.808.868,- | 99.99 |
| <b>Sub Kegiatan</b><br>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik | Rp. 18.196.666,-     | Rp. 18.010.926,-     | 98.97 |

### Gambar 3.2. Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN dan Pendidikan Politik



#### Suskeskan Pemilu Tahun 2024 Kesbangpol Helat Rakor

- Rapat koordinasi dalam rangka suskesan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan Tema "Netralitas ASN Memasuki Hari H Pemilu 2024" dilaksanakan Kesbangpol Kabupaten Polewali Mandar Kegiatan ini, dihadiri para Kepala Sekolah TK SD SMP Sederajat, Korwil pengawas satuan pendidikan, Penilik dan Staf Disdikbub yang terselenggara di Gedung Gadis , Selasa, 06 Februari 2024.



#### Suskeskan Pemilu Tahun 2024 Kesbangpol Helat Rakor

- Rapat koordinasi dalam rangka sukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan Tema "Netralitas ASN Memasuki Hari H Pemilu 2024" dilaksanakan Kesbangpol Kabupaten Polewali Mandar Kegiatan ini, dihadiri para Kepala Sekolah TK SD SMP Sederajat, Korwil pengawas satuan pendidikan, Penilik dan Staf Disdikbub yang terselenggara di Gedung Gadis , Selasa, 06 Februari 2024.

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. POLEWALI MANDAR**

**Senin, 15 Juli 2024**

**APEL PELAYANAN PUBLIK**

Apel Pelayanan Publik yang dirangkaikan dengan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Menyukceskan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dan Penandatanganan Siap Mendukung dan Menyukceskan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Pj. Bupati Polewali Mandar, Plh Sekretaris Daresah dan seluruh Pejabat Eselon I, II, III, IV dan peserta Apel. Yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Polewali Mandar

**BerAKHLAK** **ProAKTIV**

[www.prokopi.polmankab.go.id](http://www.prokopi.polmankab.go.id)

**PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR** **HUMAS POLMAN** **PROKOPIM POLEWALI MANDAR** **PROKOPIM.POLMAN** **PROKOPIM** **PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN**

**Pemkab Polewali Mandar** **Berita Hari Ini**

**KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN**

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Borahima Hadiri Koordinasi dan Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pilkada Polewali Mandar 2024 yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Dandim 1402 Polewali Mandar, Plh. Sekretaris Daresah, KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar dan Para ASN dari Kecamatan Binuang, Polewali, Anrepi dan Matakali dalam Penyampaiananya Bapak Pj. Bupati menyampaikan bahwa setiap Pegawai ASN harus Netral dalam Pilgub dan Pilup tidak berpikir dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara. Di ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar Hari Senin 30 September 2024

[www.prokopi.polmankab.go.id](http://www.prokopi.polmankab.go.id)

**PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR** **HUMAS POLMAN** **PROKOPIM POLEWALI MANDAR** **PROKOPIM.POLMAN** **PROKOPIM** **PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN**

**Pemkab Polewali Mandar** **Berita Hari Ini**

**HARI KEDUA KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN**

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Borahima Membuka Sekaligus Memberikan Materi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Sukses Pilkada Serentak 2024. Yang dihadiri oleh Dandim 1402 Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Ketua KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar, Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Wonomulyo, Tapung, Mapilli dan Campalegan di Aula Hasan Sulur SMK TPP Wonomulyo. Kemudian dilanjutkan membuka kegiatan yang sama di Rumah Adat Buttu Cipang Yang Dihadiri Oleh Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Balanipa, Tinambung, Limboro dan Alu Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024

[www.prokopi.polmankab.go.id](http://www.prokopi.polmankab.go.id)

**PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR** **HUMAS POLMAN** **PROKOPIM POLEWALI MANDAR** **PROKOPIM.POLMAN** **PROKOPIM** **PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN**

**Pemkab Polewali Mandar** **Berita Hari Ini**

**HARI KEDUA KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN**

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Borahima Membuka Sekaligus Memberikan Materi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Sukses Pilkada Serentak 2024. Yang dihadiri oleh Dandim 1402 Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Ketua KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar, Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Wonomulyo, Tapung, Mapilli dan Campalegan di Aula Hasan Sulur SMK TPP Wonomulyo. Kemudian dilanjutkan membuka kegiatan yang sama di Rumah Adat Buttu Cipang Yang Dihadiri Oleh Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Balanipa, Tinambung, Limboro dan Alu Pada Hari Selasa 1 Oktober 2024

[www.prokopi.polmankab.go.id](http://www.prokopi.polmankab.go.id)

**PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR** **HUMAS POLMAN** **PROKOPIM POLEWALI MANDAR** **PROKOPIM.POLMAN** **PROKOPIM** **PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN**

**Pemkab Polewali Mandar** **Berita Hari Ini**

**HARI KETIGA KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN**

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Borahima Membuka Sekaligus Memberikan Materi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Sukses Pilkada Serentak 2024. Yang dihadiri oleh Dandim 1402 Polewali Mandar, Polres Polewali Mandar, Ketua KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar, Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Loyo Dan Tutar di Aula Kecamatan Loyo. Dengan Tema "Netralitas ASN Dalam Mendukung Pilkada Aman, Damai Dan Berintegritas" Hari Rabu 2 Oktober 2024

[www.prokopi.polmankab.go.id](http://www.prokopi.polmankab.go.id)

**PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR** **HUMAS POLMAN** **PROKOPIM POLEWALI MANDAR** **PROKOPIM.POLMAN** **PROKOPIM** **PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN**

**Pemkab Polewali Mandar** **Berita Hari Ini**

**RAPAT KOORDINASI Dalam Rangka SUKSES PILKADA SERENTAK 2024**

Dengan Tema: "Netralitas ASN Dalam Mendukung Pilkada Aman, Damai Dan Berintegritas" Hari Rabu 2 Oktober 2024

**HARI KETIGA KOORDINASI DAN SOSIALISASI NETRALITAS ASN KECAMATAN**

Pj. Bupati Polewali Mandar Drs. Muhammad Ilham Borahima Membuka Sekaligus Memberikan Materi dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Sukses Pilkada Serentak 2024. Yang dihadiri oleh Dandim 1402 Polewali Mandar, Polres Polewali Mandar, Ketua KPU Polewali Mandar, Bawaslu Polewali Mandar, Para ASN dan Kepala Desa dari Kecamatan Loyo Dan Tutar di Aula Kecamatan Loyo. Dengan Tema "Netralitas ASN Dalam Mendukung Pilkada Aman, Damai Dan Berintegritas" Hari Rabu 2 Oktober 2024

[www.prokopi.polmankab.go.id](http://www.prokopi.polmankab.go.id)

**PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**Sasaran Strategis 3 :**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

**Target : Sangat Baik ( 85-100 % )**

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran Strategis 3, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja          | Target                 | Realisasi | Capaian |
|----|--|----------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sangat Baik ( 85-100 ) | 100.00%   | 100.00% |
|    |  |                            |                        |           |         |

Dalam rangka melakukan Kewaspadaan dini di daerah sangat penting dilaksanakan dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas di daerah sesuai amanat Permendagri nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah sebagaimana pasal 10 ayat 2 dibentuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kabupaten/kota mempunyai tugas :

- Merencanakan melaksanakan dan merusmuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di kabupaten/kota.
- Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah.
- Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim keewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi,

gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional; dan

- d) Memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendekripsi Dini dan Pencegahan dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota.

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran III untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah yang meliputi :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah di bentuk untuk melakukan kegiatan cegah dini dan deteksi dini terhadap segala potensi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah baik dari potensi, gejala yang ditimbulkan terkait Ancaman, tantangan dan hambatan dan gangguan yang terjadi di masyarakat. Potensi konflik sepanjang tahun 2024 yang ditemukan oleh Tim TKDD sebanyak 28 potensi konflik. Potensi konflik terkait Bidang Ekonomi, Sosial Budaya berdasarkan unjuk rasa dikabupaten polewali mandar menurut kelompok pelaku yang berpotensi konflik sosial. Dari hasil deteksi dini dan cegah dini dianggap berpotensi terjadinya konflik dan berhasil ditangani sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan sehingga tidak berdampak signifikan dalam mengganggu stabilitas keamanan di daerah, sehingga realisasi potensi konflik yang tertangani sebanyak 28 potensi konflik dibagi jumlah potensi konflik sepanjang tahun 2024 dapat direalisasikan kategori sangat baik dengan persentase 100 %.

Dalam rangka mendukung indikator kinerja penanganan potensi konflik di daerah sepanjang tahun 2024 didapat Frekuensi unjuk rasa di Kabupaten Polewali Mandar menurut kelompok pelaku yang berpotensi konflik sosial sebagai berikut :

| No            | Kelompok Massa | 2024      |
|---------------|----------------|-----------|
| 1             | Guru           | -         |
| 2             | Mahasiswa      | 11        |
| 3             | Buruh          | -         |
| 4             | Masyarakat     | 3         |
| 5             | Warga Desa     | 1         |
| 6             | Ormas / Parpol | 13        |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>28</b> |

Frekuensi unjuk rasa di Kabupaten Polewali Mandar menurut tuntutan

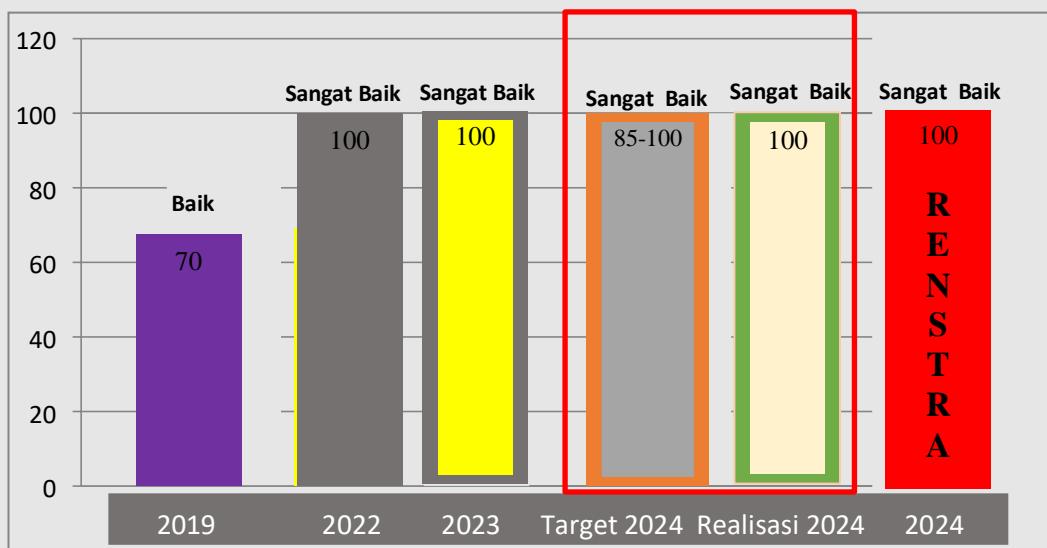
| No            | Tuntutan      | 2023      |
|---------------|---------------|-----------|
| 1             | Ideologi      | -         |
| 2             | Politik       | 13        |
| 3             | Ekonomi       | 1         |
| 4             | Sosbud        | 12        |
| 5             | Hukum dan Ham | -         |
| 6             | Pendidikan    | 1         |
| 7             | Kesehatan     | 1         |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>28</b> |

Disamping laporan potensi konflik diatas telah terjadi juga laporan konflik yang terjadi sepanjang Tahun 2024 sebagai berikut :

| No            | Jenis Konflik                        | 2024     |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| 1             | KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga) | 1        |
| 2             | Kekerasan dalam Penegakan Hukum      | -        |
| 3             | Konflik Identitas                    | -        |
| 4             | Konflik Main Hakim Sendiri           | 1        |
| 5             | Konflik Pemilihan dan Jabatan        | -        |
| 6             | Konflik Separatisme                  | -        |
| 7             | Konflik Sumber Daya                  | 1        |
| 8             | Konflik Tata Kelola Pemerintahan     | -        |
| 9             | Konflik Tawuran antar Kelompok       | -        |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>3</b> |

## PREDIKAT : SANGAT BAIK

Chart 3.3  
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat  
 Terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah  
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024  
 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional , Januari 2024

**Capaian Kinerja dasar target 2019**  

$$= \frac{100,00}{100,00} \quad 100\%$$

**Capaian Kinerja dasar 2019-2023, Meningkat :**  

$$30,00\%$$

**Capaian Kinerja target Akhir Renstra**  

$$= \frac{100,00}{100,00} \quad 100\%$$

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan potensi konflik di daerah tahun 2022 berada di level 100 % dibanding tahun 2019 mencapai (70 %). Serta Potensi Konflik pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 hal ini disebabkan pada tahun 2024 adalah tahun politik yaitu Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

#### Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Dengan adanya regulasi tersebut telah melibatkan unsur intelijen dari Kodim,Polres, BIN, Bais dalam mendukung tugas Pemerintah daerah dalam melakukan cegah dini dan deteksi dini dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di daerah

#### Faktor Penghambat :

- Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas TKDD dalam mendekripsi potensi konflik baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum memadai.
- Dukungan anggaran yang belum maksimal dari pemerintah daerah

#### Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Mengupayakan lebih intens berkomunikasi dengan instansi vertikal terkait ke intelijen dalam rangka mendukung tugas pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah kabupaten polewali mandar dalam rangka cegah dini dan deteksi dini
- Bekerjasama dengan dinas kominfo SP kabupaten polewali mandar dalam menyebarluaskan informasi terkait Pendidikan politik kepada masyarakat.
- Alokasi anggaran diupayakan lebih maksimal untuk kegiatan Kewaspadaan Dini dalam menjaga stabilitas keamanan didaerah.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik daerah sebagai berikut :

| Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Alokasi Anggaran        | Realisasi               | %            |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Program</b> Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial<br><b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  | <b>Rp. 48.080.250,-</b> | <b>Rp. 48.075.250,-</b> | <b>99,99</b> |
| <b>Sub Kegiatan</b><br>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah | Rp. 48.080.250,-        | Rp. 48.075.250,-        | 99,99        |

Gambar 3.4 : Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah





Foto Rapat Tim  
Kewaspadaan Dini Daerah



**Sasaran Strategis 4 :**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap**  
**Pemberdayaan Organisasi Masyarakat**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

**Target : Sangat Baik ( 85-100 % )**

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2024

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja          | Target                 | Realisasi | Capaian |
|----|--|----------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sangat Baik ( 85-100 ) | 76,92 %   | 76,92 % |
|    |  |                            |                        |           |         |

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan disamping sebagai wahana berkumpul bagi anggota juga harus senantiasa membawa kiprahnya ditengah-tengah pergaulan umat manusia yang nyata-nyata dirasakan manfaatnya. Untuk itu kehadirannya sangat strategi dalam mendorong pembangunan di wilayahnya untuk bersama-sama membangun kehidupan yang kokoh, meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kemartabatan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi dan akses-akses lainnya. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 yang merupakan mitra Pemerintah .

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poleweali Mandar secara terus menerus melakukan pembinaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya, sesuai

dengan amanat undang-undang tersebut. Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang idelogi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023. Hal ini dilakukan dengan maksud agar memberikan gambaran atau kondisi tentang keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Poleweali Mandar, setelah dilakukannya beberapa kali pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi tersebut sepanjang Tahun 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kajian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pencapaian yang diinginkan, mengidentifikasi masalah yang timbul terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, melakukan penilaian apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol sudah tepat dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Ormas, dan mengidentifikasi kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran Progres, serta memberi masukan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi.

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran IV untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang meliputi :

1. Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh tim terpadu organisasi kemasyarakatan yang

untuk tahun 2024 ini yang ditargetkan sebanyak 100 ormas dari 130 ormas yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar dengan persentase capaian 76,92 % dari jumlah Ormas yang terdaftar kegiatan monitoring dan evaluasi Organisasi Kemasyarakatan Telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan untuk Tahun 2024 kembali dilaksanakan akan tetapi akibat adanya refocusing anggaran sehingga target yang dicapai pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 85,96 % di Tahun 2023 Menjadi 76,92 % di tahun 2024 atau terjadi penurunan sekitar 9,04 %

**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang terdaftar  
di Badan Kesbangpol sampai dengan Tahun 2024**

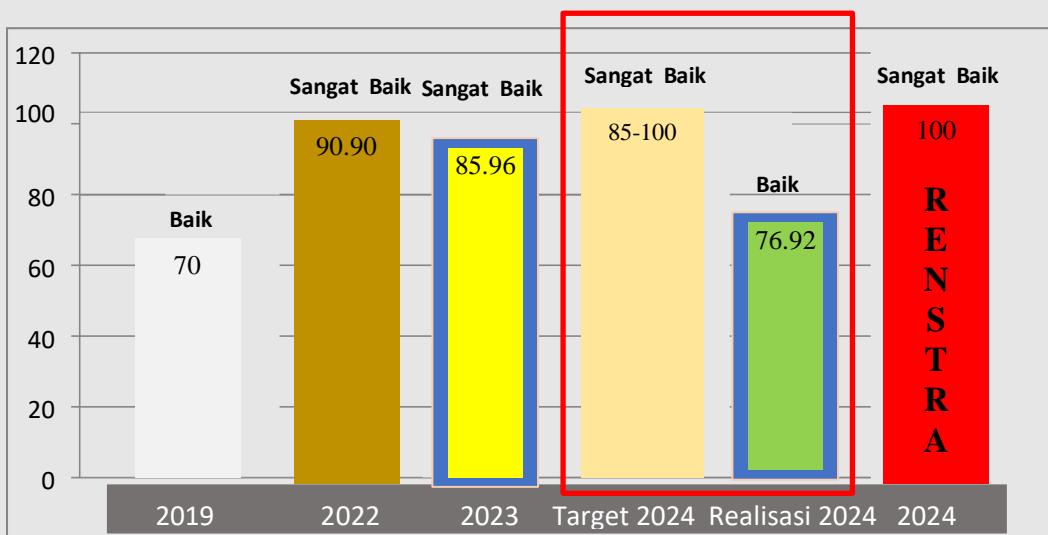
| No. | Jenis ormas      | Jumlah     |
|-----|------------------|------------|
| 1   | Ormas Kepemudaan | 7          |
| 2   | LSM              | 45         |
| 3   | BKM              | 7          |
| 4   | Yayasan          | 32         |
| 5   | Ormas Lainnya    | 39         |
|     | <b>JUMLAH</b>    | <b>130</b> |

**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang di Monev  
Pada Tahun 2024**

| No. | Jenis ormas      | Jumlah     |
|-----|------------------|------------|
| 1   | Ormas Kepemudaan | 7          |
| 2   | LSM              | 30         |
| 3   | BKM              | 6          |
| 4   | Yayasan          | 25         |
| 5   | Ormas Lainnya    | 32         |
|     | <b>JUMLAH</b>    | <b>100</b> |

## PREDIKAT : SANGAT BAIK

Chart 3.4  
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat  
 Terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan  
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024  
 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional , Januari 2024

**Capaian Kinerja dasar target 2024**  
 $= \frac{76,92}{100,00} \quad 76,92$

**Capaian Kinerja dasar 2019-2024, Meningkat :**  
 $6,92\%$

**Capaian Kinerja target Akhir Renstra**  
 $= \frac{76,92}{100,00} \quad 76,92$

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 76,92 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 6,92 % dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2023 berada di level yang mencapai (85,96 %). Capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,04 % di banding tahun 2023 disebabkan pemberdayaan dan monitoring dan evaluasi ormas hanya di fokuskan target yang di rencanakan 2024 disebabkan pagu anggaran 2024 ini mengalami penurunan dibanding anggaran tahun

2023, Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini di 2024 sudah mencapai 76,92 %.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

#### Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Tim Terpadu Pengawasan Ormas
- Dengan adanya regulasi tersebut telah melibatkan unsur intelijen dari Kodim,Polres, BIN, Bais dan Kementerian Agama dalam mendukung tugas Pemerintah daerah dalam melakukan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan keberadaan Ormas

#### Faktor Penghambat :

- Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu Ormas dalam melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan ormas.
- Sekretariat Ormas Sudah ada yang tidak sesuai dengan yang ada didaftar sehingga menyulitkan tim dalam melakuikan monev
- Dukungan anggaran yang belum maksimal dari pemerintah daerah

#### Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol senantiasa mengajak ormas untuk melakukan dialog dalam menyikapi persoalan daerah untuk senantiasa memberikan sumbangsih dan pemikiran untuk kemajuan daerah
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah kabupaten polewali mandar dalam rangka untuk melakukan pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan
- Alokasi anggaran diupayakan lebih maksimal untuk kegiatan pemberdayaan ormas.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sebagai berikut :

| Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan   | Alokasi Anggaran Perubahan | Realisasi              | %            |
|--|----------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Program</b> Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br><b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | <b>Rp. 9.957.283,-</b>     | <b>Rp. 9.882.153,-</b> | <b>99,25</b> |
| <b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah  | Rp. 9.957.283,-            | Rp. 9.957.283,-        | 99,25        |
|  |                            |                        |              |

**Gambar 3.5. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Ormas Tahun 2024**



Monev Ormas Garda Bela Negara Nasional



Monev Ormas Relawan Ratu Prabu



Monev Ormas Pusat Kajian Islam Inklusif

**Sasaran Strategis 5 :**  
**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

**Target : Sangat Baik ( 85-100 % )**

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran Strategis 5, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2024

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja          | Target                 | Realisasi | Capaian |
|----|--|----------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Indeks Kepuasan Masyarakat | Sangat Baik ( 85-100 ) | 100.00%   | 100.00% |

Dalam mendukung sasaran strategis V terkait Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sesuai program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan, penyalagunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika pada pasal 4 ayat 2 dilakukan sosialisasi berupa :

- Seminar
- Lokakarya
- Workshop
- Kegiatan keagamaan

- e. penyuluhan
- f. pagelaran seni
- g. dll

dan Peraturan Bersama Menteri agama dan meteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat menjelaskan pada Bab III pasal 8 ayat 1 berbunyi FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. Dan pada pasal 9 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

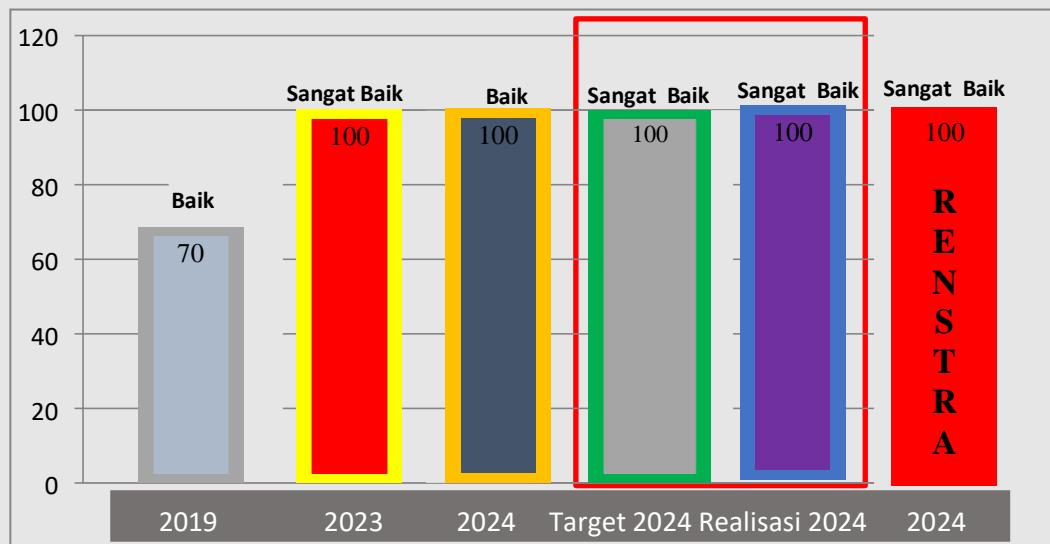
Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran V untuk tahun 2024, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi :

1. Kegiatan Diseminasi Gerakan Moderasi Beragama Pada Komunitas Pegiat Literasi dengan tujuan Untuk menanamkan nilai-nilai moderat dalam beragama dan saling menghargai, literasi moderasi beragama dapat diwujudkan melalui membaca dan menulis kegiatan ini Prakarsai oleh Balai Litbang Keagamaan Makassar setelah menerima Kunjungan koordinasi Badan kesbangpol untuk dapat memadukan kegiatan BLAM dan Pemda Polman melalui Badan Kesbangpol
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber daya pembangunan Desa/Kelurahan, kegiatan ini diinisiasi oleh BNNK polewali Mandar kerjasama Badan Kesbangpol Polewali Mandar.

## PREDIKAT : SANGAT BAIK

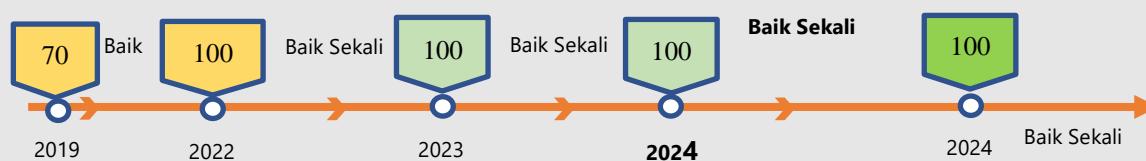
Chart 3.5  
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat  
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024  
 Target dengan Realisasi 2024, 2023-2022 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Bidang Bina Ideologi Wasbang, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekosbud , Januari 2024

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2024 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019,

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%. Capaian ini, dapat digambarkan dengan milestone sebagai berikut :



## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

### **Faktor Penunjang :**

- Adanya regulasi terkait Forum Kerukunan Umat Beragama dan P4GN
- Telah terbentuknya Pengurus FKUB Masa Khidmat 2023-2028
- Sosialisasi terkait Peningkatan Toleransi kerukunan umat beragama dan sosialisasi P4GN dan koordinasi dengan BNNK dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba sudah gencar dilakukan ke semua kalangan

### **Faktor Penghambat :**

- Sudah ada Perda terkait P4GN Tapi belum disosialisasikan
- Belum terbentuknya Tim terpadu P4GN
- Dukungan anggaran yang belum maksimal dari pemerintah daerah

### **Alternatif Solusi yang telah diupayakan :**

- Dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol senantiasa mengajak Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan stakeholder terkait untuk melakukan dialog dalam menyikapi persoalan daerah dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama dan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah kabupaten polewali mandar dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan cega dini terhadap potensi munculnya konflik keagamanan dan potensi peredaran narkotika dimasyarakat
- Alokasi anggaran diupayakan lebih maksimal untuk kegiatan pemberdayaan dan Pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap ketahanan ekonomi sosial dan budaya sebagai berikut :

| Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  | Alokasi Anggaran Perubahan | Realisasi              | %          |
|---|----------------------------|------------------------|------------|
| <b>Program</b> Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya<br><b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya          | <b>Rp. 4.257.600,-</b>     | <b>Rp. 4.257.600,-</b> | <b>100</b> |
| <b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Rp. 4.257.600,-            | Rp. 4.257.600,-        | 100        |
|   |                            |                        |            |

**Gambar 3.6. Kegiatan Diseminasi Gerakan Moderasi Beragama Bagi Komunitas Pegiat Literasi dan Monev Ketahanan Keluarga anti Narkoba**



**Kamis, 11 Juli 2024**  
**KEGIATAN DISEMINASI GERAKAN MODERASI PEGIAT LITERASI**

Badan Kesbangpol Kab. Polewali Mandar Bekerja Sama dengan Balai LitBang Agama Makassar melaksanakan Diseminasi Gerakan Moderasi Beragama pada Komunitas Pengiat Literasi Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan di Hotel Ratih Polewali pada tanggal 11 Juli 2024. Kegiatan ini di hadiri para Komunitas Pengiat Literasi yang ada di Kab.Polewali Mandar.

BerAKHLAK ProAKTIV

ProAKTIV

kesbangpol



**Kamis, 11 Juli 2024**  
**KEGIATAN DISEMINASI GERAKAN MODERASI PEGIAT LITERASI**

Badan Kesbangpol Kab. Polewali Mandar Bekerja Sama dengan Balai LitBang Agama Makassar melaksanakan Diseminasi Gerakan Moderasi Beragama pada Komunitas Pengiat Literasi Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan di Hotel Ratih Polewali pada tanggal 11 Juli 2024. Kegiatan ini di hadiri para Komunitas Pengiat Literasi yang ada di Kab.Polewali Mandar.

BerAKHLAK ProAKTIV

kesbangpol



**Sasaran Strategis 6 :**  
**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**  
**Perangkat Daerah**



Predikat SAKIP perangkat daerah

**Target : A**

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

**Target : 100%**

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

**Target : Sangat Baik**

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 pada sasaran Strategis 6, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2024

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target      | Realisasi   | Capaian |
|----|---|---|-------------|-------------|---------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | Predikat SAKIP Perangkat Daerah                                   | A           | BB          | 77,85   |
|    |   | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah | 100 %       | 100 %       | 100 %   |
|    |   | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah        | Sangat Baik | Sangat Baik | 100 %   |

**Indikator Kinerja I : Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

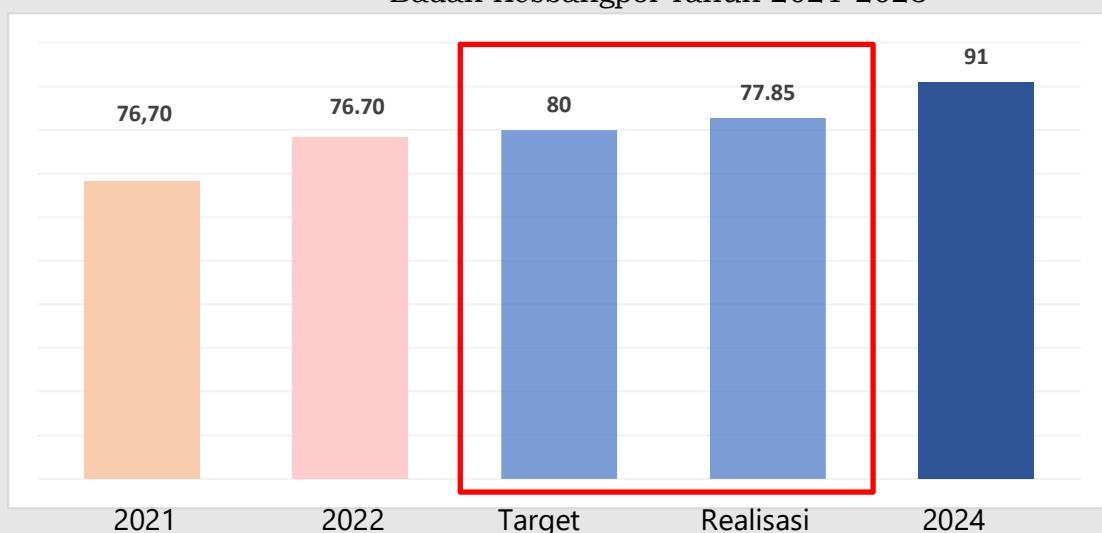
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan

Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat.

| Komponen SAKIP        | 2021         | 2022         | 2023         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Perencanaan Kinerja   | 28,30        | 28,30        | 28,50        |
| Pengukuran Kinerja    | 22,50        | 22,50        | 22,19        |
| Pelaporan Kinerja     | 9,70         | 9,70         | 9,96         |
| Evaluasi Internal     | 5,20         | 5,20         | 5,20         |
| Capaian Kinerja       | 11           | 11           | 12           |
| <b>Nilai Predikat</b> | <b>76,70</b> | <b>76,70</b> | <b>77,85</b> |
|                       | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |

Adapun capaian Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat digambarkan melalui Chart berikut ini :

Chart 3.6  
Perkembangan Implementasi SAKIP  
Badan Kesbangpol Tahun 2021-2023



**Capaian Kinerja target-realisasi 2021**

$$= \frac{76.70}{80} \quad 95,87$$

**Capaian Kinerja 2021-2023, Meningkat : 1,15 POINT**

**Capaian Kinerja target Akhir Renstra**

$$= \frac{77.85}{91} \quad 85,55$$

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari segi Bobot Nilai, walaupun predikat BB pada tahun 2021 sampai dengan 2023 . Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja semakin membaik.

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

|  |   |
|--|---|
| <b>Faktor Penunjang :</b><br>a. Tersedianya aplikasi e-SAKIP   | <b>Faktor Penghambat :</b><br>a. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja |
| <b>Solusi :</b><br>a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja<br>b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi |   |

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

| <b>Program Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>Pagu</b>      | <b>Realisasi</b> | <b>%</b>   |
|--|------------------|------------------|------------|
| <b>Perencanaan, Penganggaran dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>9.952.145</b> | <b>9.952.145</b> | <b>100</b> |
| -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | 5.448.144        | 5.448.144        | 100        |
| -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                | 2.405.233        | 2.405.233        | 100        |
| -Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.098.768        | 2.098.768        | 100        |

## Indikator Kinerja II : Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah

Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam sejak Tahun 2016-2022 selalu mencapai WTP, akan tetapi pada tahun 2023 Kabupaten Polewali Mandar meraih opini WDP dari BPK Perwakilan Sulbar, maka diharapkan pencapaian untuk tahun anggaran 2024 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

### Analisis keberhasilan dan kegagalan

| Faktor Penunjang :   | Faktor Penghambat :  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Badan Kesbangpol untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur</li> <li>b. Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan</li> <li>b. Belum optimalnya tertib administrasi aset</li> </ul> |
| <b>Solusi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan asset</li> <li>b. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan</li> </ul>   |  |

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

|   |                      |                      |            |  |
|---|----------------------|----------------------|------------|--|
| <b>Program Penunjang Urusan</b>                             |                      |                      |            |  |
| <b>Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>1.608.071.133</b> | <b>1.608.071.133</b> | <b>100</b> |  |
| <b>Kabupaten/Kota</b>                                       |                      |                      |            |  |
| <b>Kegiatan Admininstrasi Keuangan</b>                      |                      |                      |            |  |
| <b>Perangkat Daerah</b>                                     |                      |                      |            |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | 1.603.978.063        | 1.603.978.063        | 100        |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.093.070            | 4.093.070            | 100        |  |

### **Indikator Kinerja III : Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah**

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semakin membaik. Terdapat 4 (empat) layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, sebagai berikut :

1. Rekomendasi Izin Penelitian
2. Rekomendasi Izin Kegiatan
3. Surat Keterangan Keberadaan Ormas
4. Layanan Partai Politik

**Tabel 3.8**  
**Jenis Layanan Publik Non Pelayanan Langsung**

| No. | Nama Layanan  | Waktu Penyelesaian | Bidang Penanggung Jawab  |
|-----|---|--------------------|--|
| 1   | Rekomendasi Izin Penelitian                               | 30-60 Menit        | Bid. Bina Ideologi pada tahun 2020 sudah ada ASN Kesbangpol yang berada di DINAS PM PTSP untuk memberikan layanan kepada Mahasiswa |
| 2   | Rekomendasi Izin Kegiatan                                 | 30-60 menit        | Bid. Bina Ideologi   |
| 3   | Pelayanan SKT ormas dan Surat keterangan Keberadaan Ormas | 30-60 Menit        | Bid. Ormas   |
| 4.  | Layanan Partai Politik                                    | 30-60 Menit        | Bid. Poldagri  |

Mencermati Tabel terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholders atas 4 jenis layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 mencapai indeks diatas 91,65 % atau predikat kinerja layanan ‘Sangat Baik’. Sebagai pengelola data sectoral kategori C Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2024 ini meningkat dari Tahun Ketahun yang masih berada di kategori Baik, Tingginya motivasi kerja pegawai serta meningkatnya perhatian Perangkat Daerah terhadap layanan yang disediakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , turut berpengaruh terhadap capaian kinerja kepuasan pelayanan publik. Tahun 2024, capaian kinerja kepuasan layanan publik meningkat sangat pesat. Adanya dukungan perkembangan teknologi informasi secara nyata sangat berpengaruh terhadap capaian ini. Selanjutnya, capaian tahun 2024 ini menunjukkan sudah tercapai 91,65 % dari target jangka menengah yang

tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2024.

#### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

|   |  |
|---|--|
| <b>Faktor Penunjang :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingginya motivasi kerja Pegawai</li> <li>b. Adanya perkembangan teknologi dan informasi</li> <li>c. Meningkatnya perhatian Masyarakat, Ormas dan Partai Politik terhadap layanan yang disediakan Badan Kesbangpol</li> </ul> | <b>Faktor Penghambat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak</li> <li>b. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan</li> </ul> |
| <b>Solusi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai</li> <li>b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja</li> </ul>  |  |

## B. Akuntabilitas Keuangan

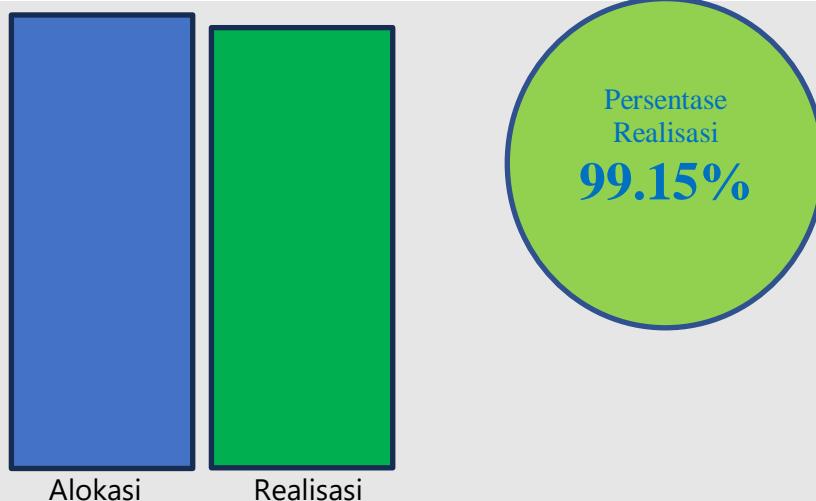
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Badan Kesbangpol, dapat disajikan sebagai berikut:

Chart 3.7  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2024

Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024, maka dapat diamati melalui Tabel berikut :

**Rp. 61.870.086.076** **Rp. 61.343.894.822**



Melihat chart diatas melihat kondisi alokasi anggaran dan realisasi sudah mencapai target dengan persentase 99,15 %



## **BAB IV**

## **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Badan Tahun 2024. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Namun ada beberapa yang tidak terealisasi akibat pencairan anggaran tidak realisasi dan ada kegiatan tidak dilaksanakan akibat refocusing tapi diupayakan dilakukan dengan bermitra Instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan kesbangpol namun secara kinerja sudah dilaksanakan Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Badan hampir mencapai 100 % serta capaian kinerja keuangan sebesar 99,15 %. Kondisi ini memperlihatkan Badan Kesbangpol berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 0,85%.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

1. Secara umum, agar kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 yang akan datang dapat ditingkatkan.
2. Agar ditingkatkan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada level Eselon IV atau Level Sub kegiatan , yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.



Kepala Badan Kesbangpol

Hj. Asliah Rahim, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19680428 198910 2 001

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Dr. Ratulangi No. 29 Polewali, Kode Pos 91314  
Telepon. 0428-21493 Faks. 0428-21493

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hj. ASLIAH RAHIM, S.Sos., M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**  
Jabatan : PJ. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua  
PJ. Bupati Polewali Mandar,

**Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19690319 198811 1 001

Pihak Pertama  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik,

**Hj. ASLIAH RAHIM, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19680428 198910 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN 2023 | TARGET 2024  |
|----|--|--|--------------|--------------|
| 1  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | Sangat 'Baik | Sangat 'Baik |
| 2  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | Sangat 'Baik | Sangat 'Baik |
| 3  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah         | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | Sangat Baik  | Sangat Baik  |
| 4  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | Sangat Baik  | Sangat Baik  |
| 5  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | Indeks Kepuasan Masyarakat                                       | Sangat 'Baik | Sangat 'Baik |
| 6  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah                | Predikat SAKIP perangkat daerah                                  | BB           | A            |
|    |  | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100%         | 100%         |
|    |  | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah       | Sangat 'Baik | Sangat 'Baik |

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

| NO | PROGRAM  | ANGGARAN          | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|------------|
| 1  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  | Rp 2,065,669,966  | APBD       |
| 2  | Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Rp 814,304,870    | APBD       |
| 3  | Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Rp 54,468,074,754 | APBD       |
| 4  | Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                          | Rp 65,633,943     | APBD       |

| NO            | PROGRAM  | ANGGARAN                 | KETERANGAN  |
|---------------|--|--------------------------|-------------|
| 5             | Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan            | Rp 21,582,153            | APBD        |
| 6             | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Rp 23,682,157            | APBD        |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>Rp 57,458,947,843</b> | <b>APBD</b> |

Polewali, 23 Pebruari 2024

Pihak Kedua  
 PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,  


**Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 NIP : 19690319 198811 1 001



Pihak Pertama  
 KEPALA BADAN KESATUAN  
 BANGSA DAN POLITIK,  
  
**H. A. SOLTIN**, S.Sos., M.Si  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19680428 198910 2 001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan Masyarakat di Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, mengisyaratkan pentingnya mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan,

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 ( satu ) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>   | <b>Relevansi</b>   | <b>Formulasi</b>  | <b>Sumber Data</b>                        |
|-----------|---|--|---|---|
| 1         | Jumlah Yang berperan Aktif dalam pemahaman Wawasan Kebangsaan | Dengan adanya sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan yang lebih intensi akan lebih menanamkan dalam hati sanubari terhadap empat pilar kebangsaan sebagai salah satu pondasi dalam berbangsa dan bernegara | $\frac{\text{Jumlah yang mengikuti pemahaman kebangsaan}}{\text{Jumlah target yang direncanakan dalam tahun itu}} \times 100$ | Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD |

**Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> | <b>Penjelasan</b>  |
|----------------------------|---------------|--|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik          | Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang memuat antara lain : meliputi 4 pilar kebangsaan yaitu : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika |

## Penjelasan Kinerja 2

### Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan ekonomi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sehingga terciptanya iklim yang kondusif dalam menjaga stabilitas daerah Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bersama Menteri agama dan meteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dan Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 ( satu ) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No | Uraian   | Relevansi  | Formulasi  | Sumber Data                               |
|----|--|--|--|---|
| 1  | Jumlah Forum toleransi intra antar umat Bergama dan yang difasilitasi dalam pencegahan penyalagunaan Narkotika dan minuman keras | Dengan adanya forum toleransi antar umat beragama dan fasilitasi P4GN akan meningkatkan ketahanan di bidang sosial budaya di mana salah satu pilar keutuhan bangsa adalah adanya ketahanan ekonomi sosial dan budaya | Jumlah Yang dibina dalam peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya ----- x 100<br>Jumlah target dalam tahun berjalan | Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD |

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja          | Target | Penjelasan  |
|----------------------------|--------|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik   | Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang mengukur antara lain kinerja indikator terhadap pemberdayaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dalam bidang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan dan penyalagunaan narkoba |

### Penjelasan Kinerja 3

#### Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Politik dalam Negeri di daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain **Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik**

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu ) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No | Uraian   | Relevansi  | Formulasi   | Sumber Data                               |
|----|--|--|---|---|
| 1  | Jumlah Masyarakat yang berperan Aktif dalam Pendidikan Politik | Dengan adanya sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat secara kontinyu akan meningkat pemahaman masyarakat dalam Pendidikan politik dan berdampak pada peningkatan masyarakat dalam untuk ikut berpartisipasi dalam setiap momen pemilihan | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan politik<br>-----<br>Jumlah yang ditargetkan dalam 1 tahun x 100 | Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD |

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja                   | Target | Penjelasan   |
|-------------------------------------|--------|--|
| Indeks Pemahaman Poliitk Masyarakat | Baik   | Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang mengukur antara lain hakkebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu,hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak perlindunga dari perlakuan diskriminatif dll serta kewajiban untuk taat pada hukum yang berlaku,menghormati HAM,menjunjung tinggi Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, kewajiban ikut serta dalam Pemilu dll. |

## Penjelasan Kinerja 4

### Uraian Sasaran

#### **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimaksud untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlunya adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendekripsi dan pencegahan dini dengan dibentuknya Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di daerah dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Konflik Sosial.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu ) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No | Uraian  | Relevansi  | Formulasi  | Sumber Data                               |
|----|---|--|--|---|
| 1  | Jumlah Potensi konflik yang terdeteksi dan tertangani | Dengan adanya Tim Kewaspadaan dini Pemerintah daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang telah terbentuk akan berdampak baik dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan daerah sekaligus terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah | $\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik yang terdeteksi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik yang terjadi dalam satu tahun}} \times 100$ | Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD |

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja          | Target | Penjelasan  |
|----------------------------|--------|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik   | Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang mengukur antaral lain adalah capaian yang dihasilkan dalam mengukur indicator potensi konflik yang terdeteksi dan tertangani |

## Penjelasan Kinerja 5

### Uraian Sasaran

#### **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan disamping sebagai wahana berkumpul bagi anggota juga harus senantiasa membawa kiprahnya ditengah-tengah pergaulan umat manusia yang nyata-nyata dirasakan manfaatnya. Untuk itu kehadirannya sangat strategi dalam mendorong pembangunan di wilayahnya untuk bersama-sama membangun kehidupan yang kokoh, meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kemartabatan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi dan akses-akses lainnya. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 yang merupakan mitra Pemerintah .

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu ) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

| No | Uraian                                | Relevansi  | Formulasi  | Sumber Data                               |
|----|---------------------------------------|--|--|---|
| 1  | Jumlah Ormas yang di bina dan diawasi | Adanya kegiatan pembinaan ormas berupa peningkatan kapasitas serta terbentuknya tim terpadu ormas dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan ormas | Jumlah ormas yang dibina dan diawasi<br>-----<br>Jumlah Ormas yang terdaftar x 100 | Laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja OPD |

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja          | Target | Penjelasan   |
|----------------------------|--------|--|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik   | Predikat Baik adalah Predikat yang didapat dan ditargetkan dalam kinerja setiap tahun dengan angka dikonversi kedalam Persentase kisaran 70 – 84 Persen yang mengukur antaral lain adalah angka yang digunakan mengukur kinerja indikator terhadap pemberdayaan dan pembinaan serta monitoring organisasi masyarakat |

|    | A  | B  | C   | D  | E   | F           | G       | H           | I           | J           | K              | L         | M  | N   | O       | P  | Q | R |
|----|--|--|---|--|---|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------|--|---|---------|----|---|---|
| 1  | EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN                   |  |   |  |   |             |         |             |             |             |                |           |  |   |         |    |   |   |
| 2  | RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR |  |   |  |   |             |         |             |             |             |                |           |  |   |         |    |   |   |
| 3  | PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024   |  |   |  |   |             |         |             |             |             |                |           |  |   |         |    |   |   |
| 4  |  |  |   |  |   |             |         |             |             |             |                |           |  |   |         |    |   |   |
| 5  |  |  |   |  |   |             |         |             |             |             |                |           |  |   |         |    |   |   |
| 6  | No   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan   | Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024 |             |         |             |             |             |                |           | Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (%) | Ket     |    |   |   |
| 7  |  |  |   |  | I   | II          | III     | IV          |             |             |                |           |  |   |         |    |   |   |
| 8  | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6           | 7       | 8           | 9=(5+6+7+8) |             | 10 = 9/4 x 100 |           | 11   | % Kinerja   | % Rp    |    |   |   |
| 9  |  |  |   |  | Kinerja   | Rupiah      | Kinerja | Rp          | Kinerja     | Rp          | Kinerja        | Rp        | Kinerja  | Rp  | Kinerja | Rp |   |   |
| 10 | 11   |  |   | Jumlah   |   |             |         |             |             |             |                |           |  |   |         |    |   |   |
| 11 |  |  |   |  |   |             |         |             |             |             |                |           |  |   |         |    |   |   |
| 12 | A  | Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu, Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat, Persentase tertib ketatausahaan kantor waktu | 100%,100%,90 %   | 1,976,020,998   | 334,244,351 | 50%     | 686,739,726 | 464,905,077 | 468,869,639 | 1,954,758,793  | 98.92     | 11   |   |         |    |   |   |
| 13 | 1  | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu  | 100%   | 9,952,145   | -           | 2 Lap   | 2,098,768   | 3,348,200   | 4,505,177   | 9,952,145      | 100.00    |  |   |         |    |   |   |
| 14 | 1  | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 1 Dok  | 5,448,144   | -           | -       | -           | 1 Dok       | 3,348,200   | 2,099,944      | 1 Dok     | 5,448,144  | 100   | 100.00  |    |   |   |
| 15 | 2  | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dok  | 2,405,233   | -           | -       | -           | 1 Dok       | 2,405,233   | 1 Dok          | 2,405,233 | 100  | 100.00  |         |    |   |   |
| 16 | 3  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 2 Laporan  | 2,098,768   | -           | 2 Lap   | 2,098,768   | -           | -           | 2 Lap          | 2,098,768 | 100  | 100.00  |         |    |   |   |
| 17 | 2  | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu  | 100%   | 1,608,071,133   | 311,144,938 | 57.143  | 591,240,141 | 352,104,900 | 353,581,154 | 1,608,071,133  | 52.14     | 100.00   |   |         |    |   |   |

|    | A | B   | C  | D          | E             | F         | G           | H        | I           | J      | K           | L      | M           | N        | O             | P   | Q      | R |
|----|---|---|--|------------|---------------|-----------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|---------------|-----|--------|---|
| 18 | 1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 252 OB     | 1,603,978,063 |           | 311,144,938 | 144 OB   | 589,204,071 | 54 OB  | 352,104,900 | 54 OB  | 351,524,154 | 252 OB   | 1,603,978,063 | 100 | 100.00 |   |
| 19 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan  | 4,093,070     |           | -           | 1 Lap    | 2,036,070   |        | -           |        | 2,057,000   | 1 Lap    | 4,093,070     | 100 | 100.00 |   |
| 20 | 3 | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Persentase tertib Adminisdrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 100%       | 6,650,000     |           | -           | 100      | 6,650,000   |        | -           |        | -           |          | 6,650,000     | 100 | 100.00 |   |
| 21 | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan   | 19 Paket   | 6,650,000     |           | -           | 19 Paket | 6,650,000   |        | -           |        | -           | 19 Paket | 6,650,000     | 100 | 100    |   |
| 22 | 4 | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase Tertib Administasi Umum Kantor  | 100%       | 145,966,399   |           | 5,782,600   | #DIV/0!  | 17,322,690  |        | 58,381,660  |        | 56,958,444  |          | 138,445,394   |     | 94.85  |   |
| 23 | 1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket    | 1,718,000     |           | -           | -        | 1,718,000   |        | -           |        | -           | 1 Paket  | 1,718,000     | 100 | 100.00 |   |
| 24 | 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 2 Paket    | 24,852,000    |           | -           | -        | 6,528,000   |        | -           |        | 13,824,000  | 2 Paket  | 20,352,000    | 100 | 81.89  |   |
| 25 | 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket    | 15,631,569    |           | -           | -        | 2,532,870   |        | -           |        | 10,098,699  | 2 Paket  | 12,631,569    | 100 | 80.81  |   |
| 26 | 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 2 Dok      | 3,240,000     |           | -           | -        | 1,080,000   |        | -           |        | 2,160,000   | 2 Dok    | 3,240,000     | 100 | 100.00 |   |
| 27 | 5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 10,927,630    |           | -           | -        | 5,463,820   |        | -           |        | 5,462,805   | 1 Paket  | 10,926,625    | 100 | 99.99  |   |
| 28 | 6 | Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 70 Laporan | 89,597,200    | 3 Laporan | 5,782,600   | -        | -           | 50 Lap | 58,381,660  | 17 Lap | 25,412,940  | 70 Lap   | 89,577,200    | 100 | 99.98  |   |
| 29 | 5 | Kegiatan : Pengadaaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD   | 100%       | 14,860,680    |           | -           | 100      | 14,860,680  |        | -           |        | -           |          | 14,860,680    | 100 | 100.00 |   |

|    | A | B  | C  | D          | E           | F | G          | H       | I          | J | K          | L | M          | N      | O           | P   | Q      | R |
|----|---|--|--|------------|-------------|---|------------|---------|------------|---|------------|---|------------|--------|-------------|-----|--------|---|
| 30 | 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 47 Unit    | 14,860,680  |   |            | 47 Unit | 14,860,680 |   | -          |   | -          |        | 14,860,680  | 100 | 100.00 |   |
| 31 | 6 | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur                  | 100%       | 154,057,841 |   | 17,316,813 |         | 32,615,779 |   | 51,070,317 |   | 39,669,538 |        | 140,672,447 |     | 91.31  |   |
| 32 | 1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan  | 30,431,291  |   | 7,116,813  | -       | 2,015,779  |   | 10,270,317 |   | 7,842,988  | 2 Lap  | 27,245,897  | 100 | 89.53  |   |
| 33 | 2 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  | 123,626,550 |   | 10,200,000 | -       | 30,600,000 |   | 40,800,000 |   | 31,826,550 | 1 Lap  | 113,426,550 | 92  | 91.75  |   |
| 34 | 7 | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM   | 100%       | 36,462,800  |   | -          |         | 21,951,668 |   | -          |   | 14,155,326 |        | 36,106,994  |     | 99.02  |   |
| 35 | 1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit     | 20,737,800  |   | -          | -       | 9,800,000  |   | -          |   | 10,582,000 | 3 Unit | 20,382,000  | 60  | 98.28  |   |
| 36 | 2 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 16 Unit    | 15,725,000  |   | -          | 8 Unit  | 12,151,668 |   | -          |   | 3,573,326  | 8 Unit | 15,724,994  | 100 | 100.00 |   |
| 37 | B | <b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>               | <b>Presentase Potensi Konflik Yang Tertangani</b>  | 100 Persen | 48,080,250  |   | -          |         | -          |   | 15,255,900 |   | 32,819,350 |        | 48,075,250  |     | 0.00   |   |
| 38 | 1 | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial              | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis  | 1 Dok      | 48,080,250  |   | -          |         | -          |   | 15,255,900 |   | 32,819,350 |        | 48,075,250  |     | 0.00   |   |

| A  | B  | C  | D         | E           | F | G          | H | I           | J      | K           | L     | M          | N      | O           | P   | Q      | R |
|----|--|--|-----------|-------------|---|------------|---|-------------|--------|-------------|-------|------------|--------|-------------|-----|--------|---|
| 39 | 1 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 4 Laporan | 48,080,250  |   | -          |   | -           | 2 Lap  | 15,255,900  | 2 Lap | 32,819,350 | 4 Lap  | 48,075,250  | 100 | 99.99  |   |
| 40 | C Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas   | 18 Persen | 9,957,283   |   | -          |   | -           |        | 7,120,000   |       | 2,762,153  |        | 9,882,153   |     | 99.25  |   |
| 41 | 1 Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis  | 1 Dok     | 9,957,283   |   | -          |   | -           |        | 7,120,000   |       | 2,762,153  |        | 9,882,153   |     | 99.25  |   |
| 42 | 1 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah  | Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 30 orang  | 9,957,283   |   | -          |   |             |        | 7,120,000   |       | 2,762,153  |        | 9,882,153   | 100 | 99.2   |   |
| 43 | D Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Indeks Wawasan Kebangsaan Masyarakat   | Baik      | 818,000,555 |   | 22,691,220 |   | 311,253,770 |        | 466,055,565 |       | 18,000,000 |        | 818,000,555 |     | 100.00 |   |
| 44 | 1 Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis  | 1 Dok     | 818,000,555 |   | 22,691,220 |   | 311,253,770 |        | 466,055,565 |       | 18,000,000 | 1 Dok  | 818,000,555 |     | 100.00 |   |
| 45 | 1 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | 0 orang   | -           |   | -          |   |             |        |             |       |            | -      |             | 0.0 |        |   |
| 46 | 2 Sub kegiatan : Pembentukan Paskibraka  | Jumlah Paskibraka  | 75 orang  | 818,000,555 |   | 22,691,220 |   | 311,253,770 | 75 Org | 466,055,565 |       | 18,000,000 | 75 Org | 818,000,555 | 100 | 100.0  |   |

|    | A | B  | C   | D          | E              | F | G              | H | I             | J      | K              | L | M             | N      | O              | P   | Q     | R |
|----|---|--|---|------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--------|----------------|---|---------------|--------|----------------|-----|-------|---|
| 47 | E | Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya  | Persentase Forum yang di Bina dan di kembangkan secara ekonomi,ketahanan ekonomi, sosial dan budaya   | 100 Persen | 4,257,600      |   | -              |   | -             |        | -              |   | 4,257,600     |        | 4,257,600      |     | 0.00  |   |
| 48 | 1 | Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya  | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis   | 1 Dok      | 4,257,600      |   | -              |   | -             |        | -              |   | 4,257,600     |        | 4,257,600      |     | 0.00  |   |
| 49 | 1 | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | 0 orang    | 4,257,600      |   | -              |   |               |        |                |   | 4,257,600     |        | 4,257,600      | 100 | 100.0 |   |
| 50 | F | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik   | Indeks Pemahaman Politik Masyarakat   | Baik       | 59,013,769,390 |   | 20,008,312,113 |   | 3,200,000,000 |        | 33,922,834,300 |   | 1,377,774,058 |        | 58,508,920,471 |     | 33.90 |   |
| 51 | 1 | Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik                            | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis   | 1 Dok      | 59,013,769,390 |   | 20,008,312,113 |   | 3,200,000,000 |        | 33,922,834,300 |   | 1,377,774,058 | 1 Dok  | 58,508,920,471 |     | 99.14 |   |
| 52 | 1 | Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Dilegalkan | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Dilegalkan | 22 Dok     | 974,647,775    |   |                |   |               | 11 Dok | 409,850,640    |   | 60,250,037    | 11 Dok | 470,100,677    | 50  | 48.23 |   |

| A  | B  | C  | D  | E              | F              | G              | H              | I             | J             | K              | L     | M             | N      | O              | P   | Q      | R |
|----|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|-----|--------|---|
| 53 | 2  | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       | 35 orang       | 58,020,924,949 | 35 0rg         | 20,008,312,113 |               | 3,200,000,000 | 33,503,123,200 |       | 1,309,373,555 | 35 Org | 58,020,808,868 | 100 | 100.00 |   |
| 54 | 3  | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4 Laporan      | 18,196,666     |                | -              |               | 2 Lap         | 9,860,460      | 2 Lap | 8,150,466     | 4 Lap  | 18,010,926     | 100 | 99.0   |   |
| 55 | JUMLAH   |  |  | 61,870,086,076 | 32.92          | 20,365,247,684 | 6.79           | 4,197,993,496 |               | 34,876,170,842 |       | 1,904,482,800 | 99.15  | 61,343,894,822 |     |        |   |
| 56 | Rata-rata Capaian Kinerja (%)  |  |  |                | 99.15          |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 57 | Predikat Kinerja   |  |  | Sangat Tinggi  |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 58 | Faktor pendorong keberhasilan kinerja :  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 59 | Faktor penghambat pencapaian kinerja:  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 60 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*:  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 61 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)   |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 62 | *) Diisi oleh Kepala Bappeda   |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 63 | Disusun : di Polewali  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 64 | Tanggal : 8 Januari 2025   |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 65 | Kepala Perangkat Daerah  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 66 |  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 67 |  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 68 |  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 69 |  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 70 |  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 71 |  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 72 | Keterangan :   |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 73 | 1. Diisi sesuai dengan maksud yang tertulis pada kolom dan baris.  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 74 | 2. Kolom 2 diisi dengan nama Program, nama kegiatan dan nama sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat Daerah tahun 2024                 |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 75 | 3. Kolom 3 diisi dengan nama Indikator Kinerja Outcome Program, Kinerja Output Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang Indikator Kinerja pada Renja perangkat Daerah tahun 2024      |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 76 | 4. Kolom 4 diisi dengan Target Kinerja dan Anggaran (Rp) Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023), atau yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Tahun 2024                              |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 77 | 5. Kolom 5 s.d 8 diisi dengan Realisasi Kinerja dan Rupiah-Anggaran (output, outcome dan Keuangan) sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Perangkat Daerah 2023, secara lengkap untuk semua triwulan |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 78 | 6. Kolom 9= (5+6+7+8). isian kolom Kinerja dan kolom Rupiah dengan menjumlahkan Realisasi capaian kinerja dan Rupiah kolom 8, 9, 10 dan 11   |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 79 | 7. Kolom 11=(9/4 x 100) isian kolom 9 didibagi hasil kolom 4 dikali 100  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |
| 80 |  |  |  |                |                |                |                |               |               |                |       |               |        |                |     |        |   |

**Hi. ASLIAH RAHIM,S.Sos,M.Si**

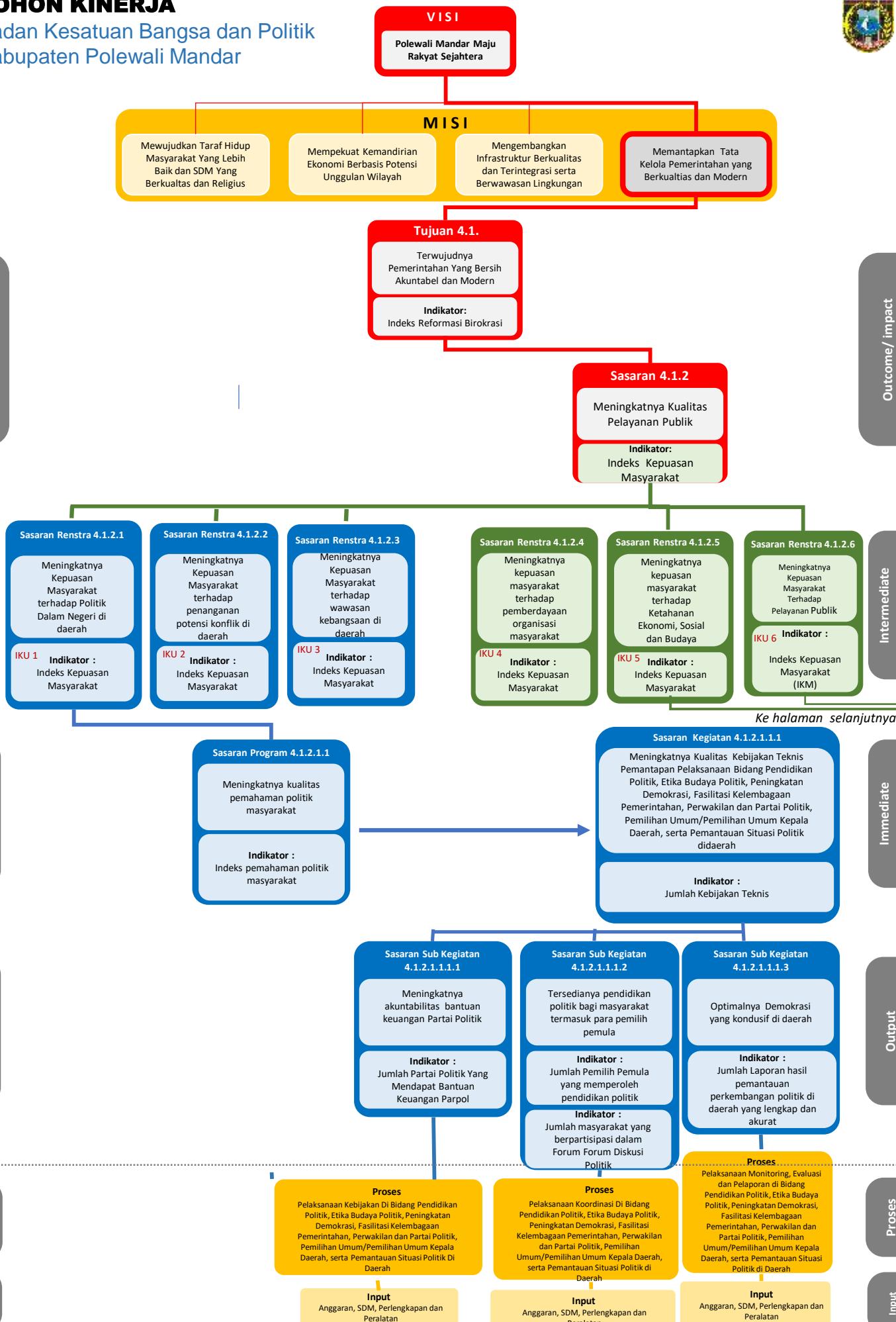
Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 198910 2 001



# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar



# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar



## VISI

Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup  
Masyarakat Yang Lebih  
Baik dan SDM Yang  
Berkualitas dan Religius

Mempekuat Kemandirian  
Ekonomi Berbasis Potensi  
Unggulan Wilayah

Mengembangkan  
Infrastruktur Berkualitas  
dan Terintegrasi serta  
Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata  
Kelola Pemerintahan yang  
Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya  
Pemerintahan Yang Bersih  
Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas  
Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap Politik  
Dalam Negeri di  
daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap  
penanganan  
potensi konflik di  
daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap  
wawasan  
kebangsaan di  
daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
pemberdayaan  
organisasi  
masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
Ketahanan  
Ekonomi, Sosial  
dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1.6

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
Terhadap  
Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat (IKM)

Ke halaman selanjutnya

#### Sasaran Program 4.1.2.2.1

Meningkatnya kualitas  
kewaspadaan dini potensi  
konflik

Indikator :  
Persentase potensi konflik  
yang tertangani

#### Sasaran Kegiatan 4.1.2.2.1.1

Meningkatnya kualitas kewaspadaan Nasional

Indikator :  
Jumlah Kebijakan Teknis

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.2.1.1.1

Optimalnya kewaspadaan  
dini atas potensi konflik di  
daerah

Indikator :  
Jumlah Laporan  
Kewaspadaan Dini

Indikator :  
Jumlah potensi Konflik  
yang tertangani

#### Sasaran Sub Kegiatan 8. 4.1.2.2.1.1.2

Optimalnya peran aktif  
Forum Koordinasi  
Pimpinan Daerah  
Kabupaten / Kota  
(Forkopimda) dalam  
kewaspadaan dini

Indikator :  
Jumlah rekomendasi  
Forum Kordinasi Pimpinan  
Daerah

#### Proses

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang  
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,  
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja  
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan  
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi  
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,  
serta Penanganan Konflik di Daerah

Input  
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan  
Peralatan

#### Proses

Pelaksanaan Forum Koordinasi  
Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota  
(Forkopimda)

Input  
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan  
Peralatan

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses

Input

Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Immediate  
Outcome

Output



# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar

## VISI

Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempukau Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.6

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### Sasaran Program 4.1.2.3.1

Meningkatnya kualitas wawasan kebangsaan masyarakat

Indikator :  
Indeks wawasan kebangsaan masyarakat

Ke halaman selanjutnya

Tersedianya Kebijakan Teknis emantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di daerah

Indikator :  
Jumlah Kebijakan Teknis

### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.3.1.1

Meningkatnya peran serta masyarakat di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Indikator :  
Jumlah masyarakat yang memperoleh pemahaman terkait Ideologi wawasan kebangsaan

### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.3.1.2

Optimalnya sinergitas di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Indikator :  
Jumlah rekomendasi tindak lanjut koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan,

Proses  
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Input  
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Proses  
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Input  
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses

Input

Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Immediate  
Outcome

Output



# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar

## VISI

Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempekuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

Ke halaman selanjutnya

#### Sasaran Kegiatan 4.1.2.4.1.1

Tersedianya Kebijakan Teknis Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator :  
Jumlah Kebijakan Teknis

#### Sasaran Program 4.1.2.4.1

Meningkatnya keberdayaan organisasi masyarakat

Indikator :  
Persentase Ormas Aktif dan Mandiri

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.4.1.1.1

Optimalnya tertiib administrasi organisasi masyarakat

Indikator :  
Jumlah rekomendasi hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.4.1.1.2

Optimalnya pemahaman Ormas terkait Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Indikator :  
Jumlah Ormas yang memperoleh Sosialisasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas

#### Proses

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Proses

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Outcome/ impact

Intermediate Outcome

Immediate Outcome

Output

Proses

Input

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses

Input



# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar

VISI  
Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempukau Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap rawatan kebangsaan di daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.6

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ke halaman selanjutnya

#### Sasaran Kegiatan 4.1.2.5.1.1

Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Indikator :  
Jumlah Kebijakan Teknis

#### Sasaran Program 4.1.2.5.1

Meningkatnya kualitas forum ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Indikator :  
Persentase Forum ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang aktif dan berkembang

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.5.1.1.1

Optimalnya sinergitas Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Indikator :  
Jumlah peserta forum Toleransi Intra dan Antar Ummat Beragama

Indikator :  
Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Minuman Keras

#### Proses

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses  
Input

Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Immediate  
Outcome

Output

Proses  
Input



# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar

VISI  
Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempekuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.6

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ke halaman selanjutnya

#### Sasaran Kegiatan 4.1.2.6.1.1

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah

Indikator :  
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu

#### Sasaran Program 4.1.2.6.1

Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran

Indikator a.:  
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.1.1

Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator :  
Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.1.2

Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

Indikator :  
Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.1.3

Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah

Indikator :  
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standart dan Tepat Waktu

Indikator :  
Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu

#### Proses

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Proses

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Proses

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses

Input

Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Immediate  
Outcome

Output

Proses

Input



# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar

## VISI

Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempukau Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.6

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ke halaman selanjutnya

#### Sasaran Kegiatan 4.1.2.6.1.2

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

Indikator :  
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu

#### Sasaran Program 4.1.2.6.1

Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran

Indikator b.:  
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.2.1

Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN

Indikator :  
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.2.2

Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun

Indikator :  
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu

#### Proses

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

#### Proses

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

#### Proses

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Proses

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses

Input

Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Immediate  
Outcome

Output

Proses

Input



# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar

VISI  
Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempukau Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.6

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ke halaman selanjutnya

#### Sasaran Kegiatan 4.1.2.6.1.3

Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah

Indikator :  
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah

#### Sasaran Program 4.1.2.6.1

Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran

Indikator c :  
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.3.1

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai

Indikator :  
jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

#### Proses

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.3.2

Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah

Indikator :  
Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan

#### Proses

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses

Input

Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Immediate  
Outcome

Output

Proses

Input

# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar



## VISI

Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup  
Masyarakat Yang Lebih  
Baik dan SDM Yang  
Berkualitas dan Religius

Mempekuat Kemandirian  
Ekonomi Berbasis Potensi  
Unggulan Wilayah

Mengembangkan  
Infrastruktur Berkualitas  
dan Terintegrasi serta  
Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata  
Kelola Pemerintahan yang  
Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya  
Pemerintahan Yang Bersih  
Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas  
Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap Politik  
Dalam Negeri di  
daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap  
penanganan  
potensi konflik di  
daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap  
wawasan  
kebangsaan di  
daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
pemberdayaan  
organisasi  
masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
Ketahanan  
Ekonomi, Sosial  
dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.6

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
Terhadap  
Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat (IKM)

Ke halaman selanjutnya

### Sasaran Kegiatan 4.1.2.6.1.4

Meningkatnya Tertib Administrasi Umum  
Kantor

Indikator :  
Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor

### Sasaran Program 4.1.2.6.1

Meningkatnya kualitas  
manajemen perkantoran

Indikator d :  
Persentase tertib  
ketatausahaan kantor

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.4.1

Terpenuhinya  
kebutuhan  
komponen  
instalasi listrik /  
penerangan

Indikator :  
Jumlah Jenis  
Komponen  
Instalasi  
Listrik/Peneranga  
n yang Tersedia

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.4.2

Terpenuhinya  
kebutuhan alat  
tulis kantor

Indikator :  
Jumlah Jenis Alat  
Tulis Kantor yang  
Tersedia

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.4.1.3

Terpenuhinya  
kebutuhan  
makan minum

Indikator :  
Jumlah Jenis  
Makan Minum  
yang Tersedia

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.4.1.4

Terpenuhinya  
kebutuhan cetak  
dan penggandaan

Indikator :  
Jumlah Jenis Cetak  
dan Penggandaan  
yang Tersedia

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.4.5

Terpenuhinya  
kebutuhan bahan  
bacaan koran dan  
majalah

Indikator :  
Jumlah Jenis  
Bahan Bacaan dan  
Peraturan  
Perundang-  
Undangan

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.4.6

Terpenuhinya  
kebutuhan  
koordinasi dan  
konsultasi dalam  
dan luar daerah

Indikator :  
Jumlah Laporan  
Koordinasi dan  
Konsultasi  
Perangkat Daerah

Proses  
Penyediaan  
Komponen  
Instalasi  
Listrik/Peneranga  
n Bangunan  
Kantor

Input  
Anggaran, SDM,  
Perlengkapan dan  
Peralatan

Proses  
Penyediaan  
Peralatan dan  
Perlengkapan  
Kantor

Input  
Anggaran, SDM,  
Perlengkapan dan  
Peralatan

Proses  
Penyediaan  
Bahan Logistik  
Kantor

Input  
Anggaran, SDM,  
Perlengkapan dan  
Peralatan

Proses  
Penyediaan  
Barang Cetakan  
dan Penggandaan

Input  
Anggaran, SDM,  
Perlengkapan dan  
Peralatan

Proses  
Penyediaan  
Bahan Bacaan  
dan Peraturan  
Perundang-  
Undangan

Input  
Anggaran, SDM,  
Perlengkapan dan  
Peralatan

Proses  
Penyelenggaran  
Rapat Koordinasi  
dan Konsultasi  
SKPD

Input  
Anggaran, SDM,  
Perlengkapan dan  
Peralatan



Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Immediate  
Outcome

Output

Proses

Input

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses

Input

# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar



## VISI

Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup  
Masyarakat Yang Lebih  
Baik dan SDM Yang  
Berkualitas dan Religius

Mempukau Kemandirian  
Ekonomi Berbasis Potensi  
Unggulan Wilayah

Mengembangkan  
Infrastruktur Berkualitas  
dan Terintegrasi serta  
Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata  
Kelola Pemerintahan yang  
Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya  
Pemerintahan Yang Bersih  
Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas  
Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap Politik  
Dalam Negeri di  
daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap  
penanganan  
potensi konflik di  
daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
terhadap  
wawasan  
kebangsaan di  
daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
pemberdayaan  
organisasi  
masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya  
kepuasan  
masyarakat  
terhadap  
Ketahanan  
Ekonomi, Sosial  
dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.6

Meningkatnya  
Kepuasan  
Masyarakat  
Terhadap  
Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator :  
Indeks Kepuasan  
Masyarakat (IKM)

Ke halaman selanjutnya

#### Sasaran Kegiatan 4.1.2.6.1.5

Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator :  
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD  
sesuai RKBMD

#### Sasaran Program 4.1.2.6.1

Meningkatnya kualitas  
manajemen perkantoran  
  
Indikator e :  
Persentase sarana dan  
prasarana kantor kondisi  
baik

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.5.1

Terpenuhinya kebutuhan  
peralatan dan mesin

Indikator :  
Jumlah peralatan dan  
mesin yang direncanakan

Proses  
Pengadaan Peralatan dan Mesin  
Lainnya

Input  
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan  
Peralatan

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi /  
Unit Es.IV

Proses

Input

Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Immediate  
Outcome

Output

Proses

Input

# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar



## VISI

Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempekuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah

IKU 1 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah

IKU 2 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah

IKU 3 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat

IKU 4 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

IKU 5 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.6

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ke halaman selanjutnya

#### Sasaran Kegiatan 4.1.2.6.1.6

Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor

Indikator : Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur

#### Sasaran Program 4.1.2.6.1

Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran

Indikator f : Persentase tertib ketatausahaan kantor

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.6.1

Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan

Indikator : Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkendola

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.6.2

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator : Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.6.3

Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor

Indikator : Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih

#### Proses

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Proses

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Proses

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Intermediate  
Outcome

Output

Proses

Input

Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Output

Proses

Input

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses

Input



# POHON KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Polewali Mandar

VISI  
Polewali Mandar Maju  
Rakyat Sejahtera

## MISI

Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius

Mempekuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

### Tujuan 4.1.

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator:  
Indeks Reformasi Birokrasi

### Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah

IKU 1 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah

IKU 2 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.3

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah

IKU 3 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.4

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat

IKU 4 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.5

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

IKU 5 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Sasaran Renstra 4.1.2.6

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

IKU 6 Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Ke halaman selanjutnya

#### Sasaran Kegiatan 4.1.2.6.1.7

Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator :  
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM

#### Sasaran Program 4.1.2.6.1

Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran

Indikator g :  
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.7.1

Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional

Indikator :  
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara

#### Proses

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

#### Sasaran Sub Kegiatan 4.1.2.6.1.7.2

Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor

Indikator :  
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara

#### Proses

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya

#### Input

Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Pemkab  
Polewali Mandar

Badan Kesbangpol  
Unit Es.II

Bidang/  
Unit Es.III

Seksi/  
Unit Es.IV

Proses

Input

Outcome/ impact

Intermediate  
Outcome

Immediate  
Outcome

Output

Proses

Input



## PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR INSPEKTORAT

Jl. Pameran Link. Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali  
Kabupaten Polewali Mandar, Kode Pos 91314

Email : [inspektorat@polmankab.go.id](mailto:inspektorat@polmankab.go.id) Website: [Inspektorat.Polman.go.id](http://Inspektorat.Polman.go.id)

Polewali, 10 Juni 2024

Nomor : 047.20/LHE/INSP/700.1.2.1/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD  
Tahun 2023

Kepada

**Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

di –

Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tujuan:
  - a. Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
  - b. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem AKIP;
  - c. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh nilai **77,85** atau memperoleh predikat rating "**BB**" (Sangat Baik). Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

|                                      | Komponen Yang Dinilai | 2023       |              | 2022       |              |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                      |                       | Bobot      | Nilai        | Bobot      | Nilai        |
| a.                                   | Perencanaan Kinerja   | 30         | 28,50        | 30         | 28,30        |
| b.                                   | Pengukuran Kinerja    | 25         | 22,19        | 25         | 22,50        |
| c.                                   | Pelaporan Kinerja     | 15         | 9,96         | 15         | 9,70         |
| d.                                   | Evaluasi Internal     | 10         | 5,20         | 10         | 5,20         |
| e.                                   | Capaian Kinerja       | 20         | 12,00        | 20         | 11,00        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>          |                       | <b>100</b> | <b>77,85</b> | <b>100</b> | <b>76,70</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b> |                       |            | <b>BB</b>    |            | <b>BB</b>    |

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memiliki dokumen perencanaan strategis berupa Renstra Tahun 2019-2024 yang telah memuat tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dilevel kabupaten ke level OPD.

Berdasarkan evaluasi, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana Strategis Tahun 2019-2024 yang telah disusun memuat tujuan, sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil dantelah dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan yaitu Renja, RKA, dan DPA. Namun untuk menghasilkan

perencanaan strategis yang lebih baik lagi perlu dilakukan monitoring target jangka menengah setiap tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.

- 2) Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan hanya dijadikan dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan.
- 3) Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan perlu dilakukan lebih optimal lagi

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja dengan targetnya dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV. Selain itu telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi monitoring kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Namun pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

c. Pelaporan Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu. Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai capaian-capaian kinerja outcome atau output penting yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Sehingga masih perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran yang berorientasi outcome hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan.

- 2) Laporan kinerja belum menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
- 3) Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian-capaian kinerja outcome atau output penting dan belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan sehingga Laporan Kinerja tidak dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta tidak dapat digunakan untuk perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.
- 4) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran.
- 5) Laporan kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran atau kinerja.
- 6) Laporan kinerja belum menyajikan informasi kinerja yang dapat diandalkan.
- 7) Informasi kinerja yang termuat dalam laporan kinerja belum dapat digunakan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

d. Evaluasi Internal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum melakukan evaluasi internal secara berkala untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, hanya melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran, sebatas memberikan informasi capaian hasil-hasil program belum memberikan informasi keberhasilan atau ketidak berhasilan program dan tindak lanjut untuk pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga hasil evaluasi tidak dapat digunakan untuk perbaikan manajemen kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

e. Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diketahui dari kinerja output dan outcome yang dilaporkan. Berdasarkan hasil output dan outcome menunjukkan bahwa target yang dapat dicapai hasilnya telah memadai namun masih perlu ditingkatkan lagi capaian-capaian indikator output dan outcome yang belum optimal dengan menyesuaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran agar lebih berkualitas dan handal.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas serta dalam rangka meningkatkan penerapan SAKIP, maka kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar direkomendasikan agar melakukan upaya perbaikan untuk setiap komponen, sub-komponen AKIP pada Tahun 2024 dengan uraian secara umum sebagai berikut :
  - a. Melakukan reviu secara berkala atas dokumen Rencana Strategis untuk mengetahui apakah Renstra yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi saat ini dan jika ada kekeliruan dapat segera dilakukan perbaikan yang hasilnya dapat menunjukkan kondisi yang lebih baik untuk mendukung terciptanya inovasi kedepan;
  - b. Melakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran serta program/kegiatan dan anggarannya untuk pencapaian sasaran strategis.
  - c. Melakukan pengukuran kinerja secara tertib dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monitoring kinerja secara optimal dengan melakukan perbaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
  - d. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi secara rutin minimal pertriwulan untuk mengetahui informasi tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan rencana atau agenda yang telah dibuat, sehingga terdapat alternatif yang dapat diberikan dan Menguatkan komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
  - e. Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran yang berorientasi outcome bukan hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja,menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian-capaian kinerja outcome atau output penting,menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antar realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi

tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan strategi (program/kegiatan) yang diperlukan.

- f. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasil program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan memanfaatkan hasilnya secara optimal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
- h. Memperhatikan dan menindak lanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Pimpinan beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Terimakasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



# Rapat Evaluasi Internal Badan Kesbangpol



**CAPAIAN KINERJA MONEV RENCANA AKSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

| URUSAN PEMERINTAHAN  | OPD PELAKSANA                     | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN   | TARGET |               | REALISASI |               | % Rp.  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|--|-----------------------------------|-----------|---|--|----------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |                                   |           |   |  |          | K      | Rp.           | K         | Rp.           |        |              |                              |                                |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI (BANDAN KESBANGPOL) | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | Predikat SAKIP Perangkat Daerah: Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM) | Predikat |        | 1,976,020,998 |           | 1,954,758,793 | 98.92  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Percentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu                   | Persen   | 100    | 9,952,145     | 100       | 9,952,145     | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  |                                   |           | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah  | Dokumen  | 1      | 5,448,144     | 1         | 5,448,144     | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  |                                   |           | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Dokumen  | 1      | 2,405,233     | 1         | 2,405,233     | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  |                                   |           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan  | 2      | 2,098,768     | 2         | 2,098,768     | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Percentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu   | Persen   |        | 1,608,071,133 |           | 1,608,071,133 | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  |                                   |           | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | orang    | 18     | 1,603,978,063 | 22        | 1,603,978,063 | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  |                                   |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD           | Laporan  | 1      | 4,093,070     | 1         | 4,093,070     | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Percentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Persen   | 100    | 6,650,000     | 100       | 6,650,000     | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  |                                   |           | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Paket    | 19     | 6,650,000     | 19        | 6,650,000     | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                            |                                   |           | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Percentase Tertib Administrasi Umum Kantor   | Persen   | 100    | 145,966,399   | 100       | 138,445,394   | 94.85  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|  |                                   |           | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Paket    | 1      | 1,718,000     | 1         | 1,718,000     | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |

| URUSAN PEMERINTAHAN               | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN  | TARGET |             | REALISASI |             | % Rp.  | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--|--|---------|--------|-------------|-----------|-------------|--------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                   |               |           |  |  |         | K      | Rp.         | K         | Rp.         |        |              |                              |                                |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |               |           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan   | Paket   | 2      | 24,852,000  | 2         | 20,352,000  | 81.89  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan  | Paket   | 2      | 15,631,569  | 2         | 12,631,569  | 80.81  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | Dokumen | 2      | 3,240,000   | 2         | 3,240,000   | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Paket   | 1      | 10,927,630  | 1         | 10,926,625  | 99.99  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Laporan | 70     | 89,597,200  | 70        | 89,577,200  | 99.98  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Kegiatan : Pengadaaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Percentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD   | Persen  | 100    | 14,860,680  | 100       | 14,860,680  | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Unit    | 47     | 14,860,680  | 47        | 14,860,680  | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Percentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur                  | Persen  | 100    | 154,057,841 | 100       | 140,672,447 | 91.31  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 2      | 30,431,291  | 2         | 27,245,897  | 89.53  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 1      | 123,626,550 | 1         | 113,426,550 | 91.75  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |               |           | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Percentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM   | Persen  | 100    | 36,462,800  | 99        | 36,106,994  | 99.02  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit    | 5      | 20,737,800  | 3         | 20,382,000  | 98.28  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Unit    | 16     | 15,725,000  | 16        | 15,724,994  | 100.00 | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                    | Presentase Potensi Konflik Yang Tertangani   | Persen  | 100    | 48,080,250  | 100       | 48,075,250  | 99.99  | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |

| URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA                     | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN  | TARGET |             | REALISASI |             | % Rp.  | PERMASALAHAN   | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN   | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|--|---|---------|--------|-------------|-----------|-------------|--------|--|--|--------------------------------|
|                     |                                   |           |  |   |         | K      | Rp.         | K         | Rp.         |        |  |  |                                |
|                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   | Presentase Potensi Konflik Yang Tertangani  | Dokumen | 1      | 48,080,250  | 1         | 48,075,250  | 99.99  | Tidak Ada  | Tidak Ada  | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                     |                                   |           | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di | Laporan | 4      | 48,080,250  | 4         | 48,075,250  | 99.99  | Rakor Tim Kewaspadaan Dini Daerah Hanya 1 Kali dilaksanakan  | Perlu Pelaksanaan Rakor Per Triwulan   | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Percentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas  | Persen  | 16     | 9,957,283   | 16        | 9,882,153   | 99.25  | Tidak Ada  | Tidak Ada  | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis   | Dokumen | 1      | 9,957,283   | 1         | 9,882,153   | 99.25  | Tidak Ada  | Tidak Ada  | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                     |                                   |           | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah  | Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | Ormas   | 30     | 9,957,283   | 0         | 9,882,153   | 99.25  | kegiatan Ini awalnya Dialog Ormas dan Perguruan Tinggi Serta Monev Ormas Akibat Adanya Refocusing Anggaran sehingga kegiatan dialog tidak dilaksanakan yang dilakukan hanya mone ormas | Melakukan Dialog ormas dalam rangka bersinergi dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam mencari solusi demi terciptanya stabilitas Sosial dan Politik di daerah | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Indeks Wawasan Kebangsaan Masyarakat  | Indeks  | Baik   | 818,000,555 | Baik      | 818,000,555 | 100.00 | Tidak Ada  | Tidak Ada  | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |           | Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Indeks Wawasan Kebangsaan Masyarakat  | Dokumen | 1      | 818,000,555 | 1         | 818,000,555 | 100.00 | Tidak Ada  | Tidak Ada  | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                     |                                   |           | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | orang   | 0      | 0           | 0         | 0           | 0.00   | Kegiatan ini Tidak dilaksanakan Akibat Refocusing Anggaran 2024  | Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan dan Tokoh Etnis Sangat Penting dalam Menjaga Stabilitas Sosial Politik Tetap Terkendali Di Polewali Mandar                  | Tidak Ada Rekomendasi          |

| URUSAN PEMERINTAHAN               | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN  | TARGET |                | REALISASI   |                | % Rp.  | PERMASALAHAN   | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN  | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---|--|---------|--------|----------------|-------------|----------------|--------|--|---|--------------------------------|
|                                   |               |           |   |  |         | K      | Rp.            | K           | Rp.            |        |  |   |                                |
|                                   |               |           | Sub kegiatan : Pembentukan Paskibraka   | Jumlah Paskibraka  | orang   | 75     | 818,000,555    | 75          | 818,000,555    | 100.00 | Tidak Ada  | Tidak Ada   | Tidak Ada Rekomendasi          |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |               |           | Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya   | Percentase Forum yang dibina dan dikembangkan secara ekonomi, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya   | Persen  | 100    | 4,257,600      | 100         | 4,257,600      | 100.00 | Tidak Ada  | Tidak Ada   | Tidak Ada Rekomendasi          |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |               |           | Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya   | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis  | Dokumen | 0      | 4,257,600      | 0           | 4,257,600      | 100.00 | Tidak Ada  | Tidak Ada   | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Orang   | 0      | 4,257,600      | 0           | 4,257,600      | 100.00 | Kegiatan ini Tidak dilaksanakan Akibat Refocusing Anggaran 2024 Yang realisasi Hanya Perjalanan Dinas Luar Daerah Terkait Kerjasama Dengan Balai Litbang keagamaan Makassar dalam Hal Peguatan Moderasi Beragama | Kedepan Perlu Sosialisasi Terkait Moderasi Beragama dan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang P4GN | Tidak Ada Rekomendasi          |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |               |           | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik  | Indeks Pemahaman Politik Masyarakat  | Indeks  | Baik   | 59,013,769,390 | Baik        | 58,508,920,471 | 99.14  | Tidak Ada  | Tidak Ada   | Tidak Ada Rekomendasi          |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |               |           | Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik             | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis  | Dokumen | 1      | 59,013,769,390 | 1           | 58,508,920,471 | 99.14  | Tidak Ada  | Tidak Ada   | Tidak Ada Rekomendasi          |
|                                   |               |           | Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 22     | 974,647,775    | 942,235,100 | 470,100,677    | 48.23  | Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parpol Semester Ke 2 Tidak Cair  | Perlu Solusi Apakah akan di anggap Utang Daerah dan Akan di realisasikan di tahun 2025                    | Tidak Ada Rekomendasi          |

| URUSAN PEMERINTAHAN                              | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN  | TARGET |                       | REALISASI |                       | % Rp.        | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |  |  |
|--|---------------|-----------|---|--|---------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|
|  |               |           |   |  |         | K      | Rp.                   | K         | Rp.                   |              |              |                              |                                |  |  |
|  |               |           | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       | Orang   | 35     | 58,020,924,949        | 35        | 58,020,808,868        | 100.00       | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |  |  |
|  |               |           | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 4      | 18,196,666            | 4         | 18,010,926            | 98.98        | Tidak Ada    | Tidak Ada                    | Tidak Ada Rekomendasi          |  |  |
| <b>JUMLAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>      |               |           |   |  |         |        | <b>1,976,020,998</b>  |           | <b>1,954,758,793</b>  | <b>98.92</b> |              |                              |                                |  |  |
| <b>JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> |               |           |   |  |         |        | <b>59,894,065,078</b> |           | <b>59,389,136,029</b> | <b>99.16</b> |              |                              |                                |  |  |
| <b>JUMLAH</b>                                    |               |           |   |  |         |        | <b>61,870,086,076</b> |           | <b>61,343,894,822</b> | <b>99.15</b> |              |                              |                                |  |  |

Polewali, 24 Januari 2025

Kepala Badan Kesbangpol



Hj. ASLIAH RAHIM, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680428 198910 2 001

## **MATRIKS CASCADING KINERJA TAHUN 2021-2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



